



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT KERJA KOMISI IV DPR RI
DENGAN
MENTERI PERTANIAN RI, DIRUT PERUM BULOG, DIRUT PT PUPUK
INDONESIA (PERSERO), DAN DIRUT PT RAJAWALI NUSANTARA
INDONESIA ID FOOD (PERSERO)**

- Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : V
Rapat Ke- : 11 (Sebelas)
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Senin, 13 Juni 2022
Waktu : Pukul 10.30 WIB s.d. 13.55 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI
Gedung Nusantara I (KK-IV)
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
- Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDI P)
Acara : Pembahasan RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2023
Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kepala Bagian
Sekretariat Komisi IV DPR RI)
- Hadir : A. Anggota Komisi IV DPR RI:
47 dari 52 orang Anggota dengan rincian:
1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
9 dari 11 orang Anggota
 - 1) Sudin, S.E./Ketua Komisi IV DPR RI
 - 2) Riezky Aprilia, S.H., M.H.
 - 3) H. Sunarna, S.E., M.Hum (Virtual)
 - 4) Ir. Mindo Sianipar (Virtual)
 - 5) Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si.
 - 6) Drs. I Made Urip, M.Si. (Virtual)
 - 7) Dr. H. Sutrisno, S.E., M.B.A.
 - 8) Maria Lestari, S.Pd.
 - 9) Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S.
 2. Fraksi Partai Golongan Karya
7 dari 8 orang Anggota
 - 1) H. Dedi Mulyadi, S.H./Wakil Ketua
Komisi IV DPR RI
 - 2) H. M. Salim Fakhry, S.E., M.M.
 - 3) Firman Soebayo, S.E., M.H. (Virtual)

- 4) Ir. H. Hanan A. Rozak, M.S.
 - 5) Ir. Panggah Susanto, M.M. (Virtual)
 - 6) Alien Mus
 - 7) Teti Rohatiningsih, S.Sos. (Virtual)
3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
6 dari 7 orang Anggota
- 1) G. Budisatrio Djiwandono/Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
 - 2) Ir. KRT. H. Darori Wonodipuro, M.M.
 - 3) Ir. H. T. A. Khalid, M.M.
 - 4) Ir. Endro Hermono, M.B.A.
 - 5) Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.Sc.
 - 6) Ir. Dwita Ria Gunadi (Virtual)
4. Fraksi Partai Nasional Demokrat
6 dari 6 orang Anggota
- 1) Rusdi Masse Mappasessu/Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
 - 2) H. Sulaeman L. Hamzah
 - 3) Ir. Abdullah Tuasikal
 - 4) Julie Sutrisno
 - 5) Yessy Melania, S.E. (Virtual)
 - 6) Ir. Hj. Sri Kustina
5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
6 dari 6 orang Anggota
- 1) Anggia Erma Rini, M.K.M./Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
 - 2) H. Muhtarom, S.Sos. (Virtual)
 - 3) Luluk Nur Hamidah, M.Si., M.P.A. (Virtual)
 - 4) Daniel Johan, S.E.
 - 5) Drs. H. Ibnu Multazam
 - 6) Edward Tanur, S.H.
6. Fraksi Partai Demokrat
5 dari 5 orang Anggota
- 1) DR. Suhardi Duka, M.M.
 - 2) Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.
 - 3) Hj. Nur'aeni, S.Sos., M.Si.
 - 4) Muhammad Dhevy Bijak Pawindu
 - 5) Bambang Purwanto, S.ST., M.H.
7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
4 dari 5 orang Anggota
- 1) drh. H. Slamet
 - 2) Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, SP., M.M. (Virtual)

- 3) Prof. Dr. Hermanto, S.E., M.M.
 - 4) H. Johan Rosihan, S.T.
8. Fraksi Partai Amanat Nasional
2 dari 3 orang Anggota
 - 1) Haerudin, S.Ag., M.H.
 - 2) Fachry Pahlevi Kanggoasa, S.E.
(Virtual)
 9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
2 dari 2 orang Anggota
 - 1) Ema Umiyyatul Chusnah (Virtual)
 - 2) K.H. Asep A. Maoshul Affandy, M.Pd.I.

B. Pemerintah

1. Menteri Pertanian (Prof. Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H.);
2. Sekretaris Jenderal (Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc.);
3. Inspektur Jenderal (Dr. Jan Samuel Maringka, S.H., M.H.);
4. Direktur Jenderal Tanaman Pangan (Dr. Ir. Suwandi, M.Si.);
5. Direktur Jenderal Hortikultura (Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc.);
6. (Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sekaligus Plt. Direktur Jenderal Perkebunan) Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D.;
7. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc.);
8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si.);
9. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (Prof. (R) Dr. Ir. Dedi Nursyamsi M.Agr.);
10. Kepala Badan Karantina Pertanian (Ir. Bambang, M.M.);
11. Direktur Utama Perum BULOG beserta jajaran (Budi Waseso);
12. Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ Holding Pangan ID FOOD (Frans Marganda Tambunan); dan
13. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero). (Achmad Bakir Pasaman).

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Bismillahirrohmanirohim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV,
Yang terhormat Menteri Pertanian beserta jajaran,
Yang terhormat Direktur Utama Perum Bulog,
Yang terhormat Direktur Utama PT Pupuk Indonesia,
Yang terhormat Saudara Direktur Utama Rajawali Nusantara Indonesia atau Holding Pangan ID FOOD serta hadirin yang kami hormati,

Mengawali rapat hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya kita dapat mengadakan Rapat Kerja hari ini dalam keadaan sehat walafiat.

Sesuai dengan Jadwal Acara Rapat Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Bamus tanggal 28 Maret dan keputusan Rapat Internal 18 Mei 2022, pada hari ini Senin tanggal 13 Juni, Komisi IV menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian dalam membahas RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib, Rapat Kerja ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.30 WIB)

Rapat kerja ini kita mulai pada pukul 10.30 WIB dan akan diakhiri pada pukul 15.30 WIB. Apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 254 ayat (2) Peraturan tentang Tata Tertib atau atas kesepakatan bersama, dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar ketua rapat;
2. Penjelasan Menteri Pertanian;
3. Tanggapan masukan Anggota Komisi IV;
4. Jawaban Menteri Pertanian;
5. Kesimpulan rapat;
6. Penutup.

Apakah acara dapat disetujui?

PESERTA RAPAT:

Setuju.

(RAPAT:SETUJU)

KETUA RAPAT:

Rapat Kerja ini merupakan rangkaian dari rapat-rapat sebelumnya dalam rangka membahas pagu Indikatif Belanja Kementerian Pertanian tahun 2023 sebesar 13,72 triliun, serta isu aktual lainnya. Dalam rapat-rapat yang lalu, Komisi IV menekankan pentingnya menyusun program dan anggaran secara cermat, terukur, bermanfaat, masif yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani dan produksi secara nasional.

Kementerian Pertanian dalam menyusun program dan anggaran juga harus mampu mengantisipasi kelangkaan dan gejolak harga pangan akibat situasi geopolitik dan perubahan iklim yang mana hampir 20 negara lebih menyetop ekspor pangannya. Tapi saya membaca di berita, bahwa Kementan akan mengekspor beras 2 juta ton ke Cina. Saya baca berita *loh*, bukan kata Kementan. saya baca berita. Terkait hal tersebut, saat ini dengan nyata dan jelas harga kebutuhan pokok melambung tinggi bahkan sangat ekstrem. Harga cabai merah misalnya mencapai Rp100.000,- tapi konon katanya, katanya Menteri Perdagangan, "akan segera turun", kata Menteri Perdagangan dalam pernyataannya saya lihat di televisi. Saya ingin sekali sebetulnya dialog dengan Menteri Perdagangan, cuman tidak dapat persetujuan dari Komisi yang bersangkutan.

Kami pun ingin mengetahui apa penyebabnya tingginya harga kebutuhan bahan pokok tersebut sehingga bisa dicari solusi yang tepat. Jangan biarkan masalah klasik ini terus berulang tanpa ada solusi yang terencana dan terukur, amat disayangkan apabila kenaikan harga ini disebabkan oleh penurunan produktivitas. Kalau terjadi penurunan produktivitas, yang salah adalah Dirjen Hortikultura dalam hal ini c.q. Kementerian Pertanian.

Terkait penyebab penyerapan anggaran Komisi IV melihat penyerapan masih rendah. Hal ini tentu saja berimplikasi terhadap belum terealisasinya bantuan pemerintah kepada petani. Komisi IV juga masih menerima laporan permasalahan kelangkaan pupuk di tingkat petani. Apakah ada solusi untuk masalah ini atau dibiarkan menjadi permasalahan yang permanen?

Kalau pemikiran saya singkat-singkat sajalah sikat habis enggak usah ada lini 2, lini 1, dari gudang langsung ke kios saja langsung. Babat habis saja yang nama distributor agen apa itu kalau pendapat saya pribadi kalau memang mekanisnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Komisi IV juga mengkritik keras upaya penanganan PMK yang dinilai tidak serius dan berjalan lambat. Berbagai masukan, saran dan kritikan yang disampaikan seperti dianggap angin lalu oleh Dirjen PKH. Saya berapa kali meminta waktu Raker, meminta memohon supaya ada refocusing anggaran tapi pada waktu itu tidak setuju. Setelah kami ngotot waktu RDP baru di iya kan. Apa sih kepentingan kami semua? Kepentingan kami ini nama baik Komisi IV dan kami harus jaga menjaga nama baik mitra kami Kementerian Pertanian untuk masalah PMK ini, bukan kita lepas tanggung jawab bukan.

Komisi IV meminta agar Kementerian Pertanian menindaklanjuti saran dan masukan yang diberikan dalam menyusun program dan anggaran baik terhadap anggaran 2023 maupun dalam rangka penanganan PMK. Komisi IV berharap masukan dan saran tersebut tergambar dalam bahan yang disampaikan oleh Saudara Menteri Pertanian pada rapat Kerja hari ini terkait upaya peningkatan penanganan PMK. Berkali-kali Komisi IV meminta Kementerian Pertanian menyusun rencana kegiatan dan rincian kebutuhan anggaran untuk kemudian dibahas bersama-sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Komisi IV terus menyoroti beberapa hal yang menjadi keluhan dan pengaduan masyarakat yang terkait upaya pergantian ternak sapi yang mati akibat terkena dampak PMK. Komisi IV juga menganggap hal ini penting sebagai bentuk intervensi dan kebijakan pemerintah kepada peternak, karena di luaran ini, saat ini peternak saja seolah-olah berkata, "Pemerintah di mana loh saat ini? Dirjen PKH-nya ke mana? Kami berusaha sendiri, bekerja sendiri yang nama vitamin seberapa ketersediaannya, obat-obatannya berapa ketersediaannya, cairan disinfektannya ada berapa banyak, kami pun enggak tahu". Jangankan petani, ini Anggota Komisi IV ini beserta Pimpinan saja enggak tahu *kok* vitamin ada berapa, obat-obat berapa untuk mencegahnya khususnya peternak rakyat. Namun, hingga rapat ini dimulai Komisi IV melihat hal tersebut belum tergambar dalam rencana kegiatan tahun 2023.

Untuk itu, Komisi IV mempertanyakan keseriusan Kementerian Pertanian beserta jajarannya dalam menyusun kegiatan dan program tahun 2023 di antaranya terkait usulan penambahan yang pernah disampaikan oleh Saudara Menteri Pertanian, dimana hingga saat ini belum menggambarkan rincian kegiatan dan usulan tersebut dalam bahan yang disampaikan.

Beberapa waktu lalu teman-teman ada yang mengusulkan tambahan untuk penanganan PMK 2 triliun, tapi saya seba.. saya bersama Pimpinan lain sepakat saya tolak dengan catatan. Jangankan 2 triliun, 4 triliun kami menyetujui, 10 triliun kami menyetujui tapi dengan satu catatan, harus ada rinciannya. Jangan tiba-tiba penambahan PMK 2 triliun, enak benar kami memberikan cek kosong kepada pemerintah. Saya enggak mau dalam hal ini karena nanti kalau terjadi apa-apa kami berlima Pimpinan yang kena masalah.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Demikian pengantar kami sampaikan selanjutnya kami persilakan Saudara Menteri untuk menyampaikan rencana Kerja Rapat hari ini. Kami persilakan.

MENTERI PERTANIAN RI (Prof. Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH., M.Si., MH.):

Bismilahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV DPR RI yang kami sangat hormati dan banggakan,
Bapak/Ibu sekalian jajaran pejabat dan BUMN yang sempat hadir dan hadirin sekalian yang berbahagia,

Alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwwata illah billah.

Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga pada hari ini Senin, 13 Juni 2002 kita dapat melaksanakan Rapat Kerja dalam keadaan sehat walafiat.

Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang kami hormati,

Menindaklanjuti hasil Rapat Kerja pada tanggal 2 Juni 2022 dan Rapat Dengar Pendapat atau RDP tanggal 8 Juni 2022 dengan seluruh Eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian, izinkan kami melaporkan kembali RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2023 sebagai berikut. Bahwa dalam rangka merencanakan program yang dan anggaran tahun 2023, acuan yang digunakan oleh Kementerian Pertanian berpedoman pada 4 program Kementerian Pertanian, yaitu:

1. Program ketersediaan dan akses konsumsi pangan berkualitas;
2. Program nilai tambah dan daya saing industri;
3. Program pendidikan dan pelatihan vokasi; dan
4. Program dukungan manajemen.

Keempat program Kementerian Pertanian tersebut disusun dengan mempertimbangkan berpindahnya fungsi penelitian, pengembangan dan pengkajian dan penerapan lingkungan atau Litbangjirab ke BRIN sehingga pada tahun sebelumnya terdapat program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka pada tahun 2023 nomenklatur program tersebut tidak digunakan. Walaupun terjadi pengurangan program rencana kerja program dan anggaran tahun 2023 tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah atau RKP dengan tema Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, juga berpedoman pada mandat yang diberikan kepada pemerintah ke Kementerian Pertanian dalam mendukung prioritas nasional atau PN1, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan dan 2 program prioritas atau PP, yaitu PP 3 peningkatan ketersediaan akses, akses dan kualitas konsumsi pangan dan PP 6, yaitu peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi.

Rancangan pelaksanaan kegiatan utama tahun 2023 dilakukan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan masukan Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI pada saat Raker maupun RDP yang telah kita lakukan. Tumpuan pelaksanaan kegiatan utama ditetapkan oleh Direktorat Jenderal teknis yang membidangi tanaman pangan, Hortikultura, perkebunan dan peternakan. Sebagai contoh untuk Dirjen Peternakan dan Kesehatan

Hewan pada tahun 2023 telah ditambah kegiatan utama berupa optimalisasi reproduksi dan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku atau PMK. Khusus untuk kegiatan penanganan PMK menjadi prioritas tahun 2023 terutama untuk mendukung berbagai sub kegiatan seperti pembelian obat-obatan, produksi vaksin dalam negeri dan pelaksanaan vaksin massal serta lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan RDP.

Untuk mendukung Direktorat Jenderal teknis dalam pelaksanaan kegiatan utama, maka Eselon 1 lainnya yaitu Dirjen PSP, Dirjen BPBPDSDMP, Badan Karantina Pertanian, Irjen, dan Setjen menjadi pendukung baik penyiapan sarana dan prasarana, penyediaan benih, Bimtek dan pengawasan serta dukungan manajemen yang akuntabel.

Dengan alokasi anggaran yang tersedia pada tahun 2023 melalui kesempatan ini kami laporkan pula perubahan target produksi produk komoditas utama khususnya padi menjadi sebesar 54,50 juta ton, jagung menjadi 23,05 juta ton, dan kedelai 0,20 juta ton. Untuk target produksi komoditas lainnya tidak mengalami perubahan. Produksi bawang merah ditargetkan 1,71 juta ton, cabai 2,93 juta ton, tebu 37,15 juta ton, dan setara Gula Kristal Putih atau GKP 2,6 juta ton dan daging sapi, kerbau 0,46 juta ton.

Dalam rangka pelaksanaan program kegiatan pembangunan pertanian 2023 sesuai dengan surat bersama pagu indikatif atau SBPI Nomor S.353/MK.02/2022 dan B-301/M.PPN/B.8/PP/04.02/04/2022, Kementerian Pertanian mendapatkan pagu indikatif Rp13,73 triliun dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretariat Jenderal Rp1,56 triliun;
2. Inspektorat Jenderal Rp137,61 miliar;
3. Dirjen Tanaman Pangan Rp2,51 triliun;
4. Dirjen Horti Rp1,03 triliun;
5. Dirjen Perkebunan Rp1,14 triliun;
6. Dirjen PKH Rp1,64 triliun;
7. Dirjen PSP Rp2,7 triliun;
8. Badan Litbang Pertanian Rp903,81 miliar;
9. Badan PPSDM Pertanian Rp899,04 miliar;
10. Badan Ketahanan Pangan Rp103,52 miliar; dan
11. Badan Karantina Pertanian Rp1,09 triliun.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Terkait dengan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) tahun 2022 untuk mengakselerasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan di lapangan, maka telah dirancang usul area alokasi anggaran sebesar Rp180,78 miliar untuk penanganan PMK yang dirinci dari realokasi internal Dirjen PKH sebesar Rp80,78 miliar dan sisa dari sumber eksternal Eselon I lainnya sebesar Rp100 miliar. Sumber realokasi eksternal diambil dari Sekretariat Jenderal Rp13 miliar, Dirjen Tanaman Pangan Rp20 miliar, Dirjen Hortikultura Rp10 miliar, Dirjen Perkebunan Rp10 miliar, Dirjen PSP Rp25 miliar, BPPSDMP Rp7,7 miliar, dan Badan Karantina Pertanian sebesar Rp15 miliar.

Dengan adanya realokasi anggaran internal dan eksternal untuk mengatasi penanganan PMK tersebut, maka diusulkan perubahan komposisi akhir anggaran Eselon I pada tahun 2002 sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal menjadi Rp1,58 triliun;
2. Inspektorat Jenderal Rp97,68 miliar;
3. Dirjen Tanaman Pangan Rp2,17 triliun;
4. Dirjen Hortikultura Rp1,09 triliun;
5. Dirjen Perkebunan Rp1,16 triliun;
6. Dirjen PKH Rp1,69 triliun; dan
7. Dirjen PSP Rp2,96 triliun;
8. Badan Litbang Pertanian Rp1,29 triliun;
9. Badan PPSDM Pertanian Rp1,23 triliun;
10. Badan Ketahanan Pangan dan Badan Pangan Nasional Rp321,52 miliar; dan
11. Badan Karantina Pertanian Rp1,107 triliun.

Selain itu, sebagai tindak lanjut dari kesimpulan RDP tanggal 8 Juni 2022, Kementerian Pertanian sudah bersurat ke Menteri Keuangan agar anggaran yang diblokir sebesar Rp1,17 triliun melalui mekanisme *Automatic Adjustment* dibuka untuk sepenuhnya digunakan penanganannya bagi PMK. Sementara agar penanganan dapat dilakukan secara luas berdasarkan kebutuhan anggaran disusun per tanggal 8 Juni 2002 bahwa total anggaran diperlukan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 4,42 triliun.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati, Bapak dan hadirin

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Apabila diperlukan penjelasan lebih rinci mohon berkenan Pimpinan agar pejabat Eselon I yang bersangkutan dapat diberi kesempatan memberi penjelasan tambahan sesuai dengan kesepakatan di RDP yang ada.

Atas perhatian Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV DPR kami ucapkan terima kasih dan kami kembalikan pada Pimpinan.

Sekian.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam

Terima kasih Saudara Menteri atas penjelasannya.

Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada Dirjen PKH. Apakah Dirjen Anggaran sudah menyetujui refocusing tadi yang dikatakan 180 Miliar? Apa perlu ada keputusan dari Dirjen Anggaran atau tidak?

DIRJEN PKH (Dr. Ir. NASRULLAH, M.Sc):

Izin, Pak Menteri.

Kita sudah melakukan komunikasi Pak dan *review* oleh Dirjen Anggaran...

KETUA RAPAT:

Baru komunikasi *toh*, belum ada persetujuan kan yang berapa hari lalu dipanggil ke Kementerian Pertanian kan? Enggak, jawab jujur saja. Saya ini paling suka kita terbuka untuk mencari solusi. Ya? Ya, kan belum ada persetujuan kan baru dipanggil datang ke Kementerian Pertanian kan minggu lalu kan?

DIRJEN PKH (Dr. Ir. NASRULLAH, M.Sc):

Yang 80 Miliar maksudnya Pak?

KETUA RAPAT:

180.

DIRJEN PKH (Dr. Ir. NASRULLAH, M.Sc):

Oh yang 180 belum Pak, kan 100 ini kan baru yang kemarin RDP Pak kita putuskan.

KETUA RAPAT:

Terus beli vaksinnya yang 3 juta dari mana?

DIRJEN PKH (Dr. Ir. NASRULLAH, M.Sc):

Izin. Yang 80.000 itu yang dari refocusing PKH..

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI)

80 miliar bukan 80.000, 80 santai saja. Saya tanya supaya kita jelas.

DIRJEN PKH (Dr. Ir. NASRULLAH, M.Sc):

Jadi yang 80.000 dosis Pak itu diambil dari anggaran 80 miliar, itu termasuk obat-obatan dan operasionalnya. Untuk tambahan 2,2 juta dosis adalah dari...

KETUA RAPAT:

Bukan 80.000 dosis kali, 800.000 dosis.

DIRJEN PKH (Dr. Ir. NASRULLAH, M.Sc):

800.000 *sorry* Pak.

KETUA RAPAT:

Tenang saja santai saja enggak usah gugup. Saya menanya ini yang yang tahu yang saya dapat info. Jadi yang 800.000 itu anggaran itu yang yang yang lain refocusing apa sudah disetujui oleh Dirjen Anggaran?

DIRJEN PKH (Dr. Ir. NASRULLAH, M.Sc):

Yang 100 belum Pak.

KETUA RAPAT:

Nah, berarti kan belum beli 3 juta toh?

DIRJEN PKH (Dr. Ir. NASRULLAH, M.Sc):

Belum, Pak.

KETUA RAPAT:

Jangan Anda bilang nanti minggu kedua 3 juta datang, ini loh supaya kita terbuka. Yang kedua, bagaimana pembicaraan Anda sama FAO yang waktu itu Anda katakan.

DIRJEN PKH (Dr. Ir. NASRULLAH, M.Sc):

Jadi FHO itu Pak ini yang kaitan dengan yang Vietnam yang 10.000 bantuan.

KETUA RAPAT:

Enggak, pembicaraannya sama FAO bagaimana? Anda jangan lari-lari ke Vietnam. Yang saya tanyakan, Anda ada bicara dengan FAO, FAO akan membantu, hasilnya bagaimana. Ini jangan lari-lari ke Vietnam, ke Australia, saya enggak mau. Saya tanya itu dulu.

DIRJEN PKH (Dr. Ir. NASRULLAH, M.Sc):

Ya Pak. Jadi hari Sabtu saya bicara langsung dengan perwakilan FAO dan akan mengupayakan bantuan 10.000 dosis yang rencana diambil dari Vietnam, Pak.

KETUA RAPAT:

Hari Sabtu apa hari Jumat?

DIRJEN PKH (Dr. Ir. NASRULLAH, M.Sc):

Eh hari Jumat, hari Jumat sore Pak.

KETUA RAPAT:

Oh ya kan, berarti Jumat kan bukan Sabtu kan. Jumat itu ada MoU belum?

DIRJEN PKH (Dr. Ir. NASRULLAH, M.Sc):

Belum, Pak.

KETUA RAPAT:

Kan mereka hanya bilang akan membantu. Ingat *loh*. Anda jangan, saya juga enggak mau ada ada ada mengada ada ada nanti Anda dibohongi. Akan membantu Negara Republik Indonesia, belum ada MoU, belum ada persetujuan dan itu Anda enggak ketemu dengan dia ingat. Saya tuh mau terbuka ya melalui *Zoom Meeting*, iya.

DIRJEN PKH (Dr. Ir. NASRULLAH, M.Sc):

Enggak saya ketemu langsung Pak di Arya Duta Hotel Pak.

KETUA RAPAT:

Ya Anda boleh ngomong nyatanya kan MoU-nya belum ada. Baru “nanti akan saya bantu”, nanti akan, “nanti akan saya bantu”, ini digarisbawahi.

DIRJEN PKH (Dr. Ir. NASRULLAH, M.Sc):

Siap, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Terus nanti kalau vaksinya sudah datang menyimpannya bagaimana? Perlu berapa perlu peralatan khusus kah atau apakah temperatur berapakah.

DIRJEN PKH (Dr. Ir. NASRULLAH, M.Sc):

Kita punya penyimpanan Pak itu di Bogor Pak, balai kita. Itu bisa di *stocking* di situ vaksin untuk bisa selanjutnya kan di distribusi berdasarkan kebutuhan Pak.

KETUA RAPAT:

Waktu distribusinya bagaimana pakai apa?

DIRJEN PKH (Dr. Ir. NASRULLAH, M.Sc):

Pakai mobil *cold change* Pak, yang *cold storage* yang ada pendinginnya Pak.

KETUA RAPAT:

Oh, termasuk ke Aceh? Dengan temperatur berapa?

DIRJEN PKH (Dr. Ir. NASRULLAH, M.Sc):

Bagaimana Pak?

KETUA RAPAT:

Dengan temperatur berapa?

DIRJEN PKH (Dr. Ir. NASRULLAH, M.Sc):

Temperaturnya nol, Pak untuk vaksin penyimpanannya.

KETUA RAPAT:

Terus pengirimannya nol juga?

DIRJEN PKH (Dr. Ir. NASRULLAH, M.Sc):

Harus seperti itu Pak.

KETUA RAPAT:

Oh jadi nanti kalau nol itu setahu saya kalau hanya *cool box* enggak bisa. Paling tidak nanti truknya ditaruh kulkas.

DIRJEN PKH (Dr. Ir. NASRULLAH, M.Sc):

Jadi mungkin akan, akan ada perlakuan Pak, ini lagi kita tata untuk pengangkutannya Pak akan tersusun dalam program.

KETUA RAPAT:

Enggak, saya ini kan bertanya jangan sampai kita negara keluar uang, vaksinnya itu dengan suhu tertentu akan rusak.

DIRJEN PKH (Dr. Ir. NASRULLAH, M.Sc):

Siap, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Coba mana dokter yang mengerti mengenai vaksin. Saya minta dijelaskan suhu berapa.

Izin Pak Menteri. Tolong dijawab.

DIREKTUR KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. NURYANI ZAINUDDIN, M.Si):

Izin Pak Menteri. Izin Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya.

DIREKTUR KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. NURYANI ZAINUDDIN, M.Si):

Saya Nuryani Zainuddin, Direktur Kesehatan Hewan.

Terkait dengan *cold chain* vaksin itu di 2 sampai dengan 8 derajat Celcius Pak.

KETUA RAPAT:

Minus 2.

DIREKTUR KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. NURYANI ZAINUDDIN, M.Si):

2 Pak. 2 sampai dengan 8 derajat Celcius.

KETUA RAPAT:

Kalau di atas 8 kan vaksin akan *expired*, betul?

DIREKTUR KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. NURYANI ZAINUDDIN, M.Si):

Akan terganggu efektivitasnya Pak.

KETUA RAPAT:

Ya sama juga dengan *expired* tidak ada gunanya kan?

DIREKTUR KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. NURYANI ZAINUDDIN, M.Si):

Ya.

KETUA RAPAT:

Terus lanjutkan cara pengirimannya nanti bagaimana?

DIREKTUR KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. NURYANI ZAINUDDIN, M.Si):

Jadi mungkin nanti kami bisa di-*support*, Pak Menteri dan Pak Ketua terkait dengan *cool box* yang memang *Cold Chain*-nya itu bisa terpenuhi dalam pengiriman 1 kali 24 jam karena berdasarkan pengalaman untuk pengiriman ke nus apa namanya daerah, daerah Barat itu kita butuh yang *express* itu 1 kali 24 jam Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Oke. Sampai misalnya dari Jakarta ini dikirim ke Aceh ke Banda Aceh pakai pesawat.

DIREKTUR KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. NURYANI ZAINUDDIN, M.Si):

Ya.

KETUA RAPAT:

Dari Banda Aceh dikirim ke Kabupaten ke Kecamatan pakai apa?

DIREKTUR KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. NURYANI ZAINUDDIN, M.Si):

Itu yang kita nanti akan meminta juga terkait dengan *Cool Box* yang memang sudah suhunya terjaga. Jadi bukan *Cool Box* yang kita beli di Supermarket Pak Ketua, jadi memang ada *Cool Box* khusus seperti membawa vaksin Covid-19 sehingga vaksin itu *Cold Chain*-nya bisa terjaga.

KETUA RAPAT:

Saya tahu dokter, saya bukan enggak tahu. Saya tahu pakai *Cool Box* yang untuk khusus untuk vaksin. Nah, tetapi kan Anda belum siapkan, tadi Anda mengatakan akan ...

DIREKTUR KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. NURYANI ZAINUDDIN, M.Si):

Ya, kami sudah mengajukan Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Berarti belum kan?

DIREKTUR KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. NURYANI ZAINUDDIN, M.Si):

Sudah diajukan, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Jadi katanya pertengahan minggu kedua berarti tanggal 15, dua hari lagi vaksin 3 juta sudah datang tapi jawaban Saudara Dirjen PKH yang baru dibeli

800.000 karena yang selebihnya belum ada persetujuan dari Dirjen Anggaran yang minggu lalu diundang ke Kementerian Pertanian. Saya tidak menyalahkan siapa pun dalam hal ini. Semua itu salah Sekjen, Sekjen itu *leader* loh. Sekjen adalah leader paling depan untuk semua permasalahan. Sekjen juga melobi Dirjen Anggaran, Sekjen juga ke sana ke sini termasuk ke Bappenas.

Bagaimana Pak dengan ini Pak, ini Pak, ini Pak. Kalau kita hanya mencantumkan tambahan anggaran 2 triliun tapi kalau Bappenas-nya enggak mau, Dirjen Anggarannya tidak kita bicara. Bos Kasdi ucapkan minta tolong. Kita enggak hina kalau bicara sama orang lain minta tolong. Anda kan enggak pernah ngomong begitu. Ini *loh* yang saya sayangkan. Saya ini ingin mencari jalan terbaik paling cepat. Dokter, saya tanya saat ini *you* punya stok apa obat, apa vitamin, berapa banyak saya mau tahu.

DIREKTUR KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. NURYANI ZAINUDDIN, M.Si):

Izin, Pak Menteri.

KETUA RAPAT:

Termasuk disinfektan.

DIREKTUR KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. NURYANI ZAINUDDIN, M.Si):

Ya, izin Pak Ketua.

Terkait dengan obat-obatan memang saat ini stok kami sudah menipis. Jadi memang untuk seperti antipiretik kemudian antibiotik itu ada tetapi memang untuk meng-*cover* 18 provinsi sudah tidak bisa, Pak Ketua dan kami sementara ini sedang melakukan pengadaan terkait dengan obat-obatan ini berdasarkan hasil refocusing anggaran dari dalam Dirjen PKH sendiri. Tidak besar Pak Ketua tapi mudah-mudahan bisa menyambung sambil menunggu anggaran selanjutnya.

KETUA RAPAT:

Yang disinfektan?

DIREKTUR KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. NURYANI ZAINUDDIN, M.Si):

Kebetulan untuk desinfektan, kami mendapatkan bantuan dari FAO Pak Ketua sebanyak 900 ribu, 900 ribu kilo yang dikirim oleh FAO bersama dengan beberapa peralatan APD alat pelindung diri yang sudah diserahterimakan kemarin Pak Ketua dan itu yang kami *support* kepada beberapa Provinsi yang tertular.

KETUA RAPAT:

Kira-kira vitamin sama obat-obatannya kapan ada lagi. Ini stok yang ada untuk berapa ekor sapi kira-kira?

DIREKTUR KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. NURYANI ZAINUDDIN, M.Si):

Kami lagi pengadaan Pak Ketua terkait dengan..

KETUA RAPAT:

Saya tanya stoknya ada berapa?

DIREKTUR KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. NURYANI ZAINUDDIN, M.Si):

Izin Pak Ketua, saya harus cek kembali ke tim apa namanya obat hewan untuk stoknya.

KETUA RAPAT:

Oke, terima kasih.

Sekarang saya tanya sama Kepala Badan Karantina. Kalau Pak Johan itu dari NTB mau masukkan sapi ke Jawa Timur mekanismenya seperti apa Karantina?

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN (Ir. BAMBANG, MM.):

Izin Pak Menteri.

Bapak Ketua yang kami hormati,

Bahwa untuk pengangkutan sapi dari NTB ke...

KETUA RAPAT:

NTB kan masih wilayah non PMK ini ceritanya ini atau ada sebagian saya enggak tahu. Dari NTB atau di NTT mau dibawa ke Surabaya untuk dijual ya kan. Anda jangan bicara kapan angkut sapilah, enggak ada gunanya ngomong itu. Coba apa bagaimana mekanismenya supaya semua masyarakat tahu karena ini kan *live* semua masyarakat harus mendengar harus tahu.

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN (Ir. BAMBANG, MM.):

Baik.

Terima kasih, Pak Ketua.

Jadi pengangkutan sapi hanya berasal dari daerah yang sehat. Untuk dari NTT menuju Jakarta misalnya yang semula kita larang melalui jalur darat, kemudian karena tuntutan masyarakat kita perbolehkan melalui jalur darat lewat Tanjung Perak tetapi dengan...

KETUA RAPAT:

Jalur laut maksudnya.

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN (Ir. BAMBANG, MM.):

Jalur darat, Bapak.

KETUA RAPAT:

Kalau jalur darat dari Surabaya

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN (Ir. BAMBANG, MM.):

Lewat Surabaya.

KETUA RAPAT:

Surabaya baru ke Jakarta. Nah, terus?

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN (Ir. BAMBANG, MM.):

Alternatifnya melalui jalur laut.

KETUA RAPAT:

Terus?

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN (Ir. BAMBANG, MM.):

Yang khusus jalur darat, kita lakukan pengawalan ketat dengan desinfektan pada saat tiba kemudian dikawal tidak diperkenankan berhenti di daerah wabah dan hanya khusus untuk tujuan dipotong dan untuk Idul Adha yang melalui jalur darat ini. Kemudian yang melalui jalur laut sebenarnya kita prioritaskan dulu tetapi setelah kita konfirmasi minta dukungan Kementerian Perhubungan tetapi ketersediaan kapal kita kurang itulah alasan kita membantu masyarakat untuk kita lewatkan jalur darat tetapi untuk jalur laut tetap kita lakukan untuk secara khusus daerah-daerah yang menuju daerah yang sehat dari daerah sehat ke yang sehat Bapak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Tiba di tempat tujuan tidak ada yang namanya karantina? Langsung dipotong?

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN (Ir. BAMBANG, MM.):

Izin, Pak Ketua.

Jadi karantina dimaksudkan untuk menjamin kesehatan hewan dilakukan pada saat menjelang keberangkatan. Kemudian tiba di daerah tempat tujuan, khusus untuk antar pulau ini tidak dilakukan lagi karantina karena sudah dipersiapkan untuk pemotongan kecuali kalau sapi yang diimpor, Pak. Khusus sapi yang diimpor dilaksanakan karantina dua kali, yaitu karantina di daerah asal dan karantina di daerah kita ketika kita menerima itu masing-masing 14 hari, tetapi khusus antar pulau ini dan khusus untuk layanan dipotong dan untuk Idul Adha kita lakukan karantina di daerah asal. Kemudian tetap dilakukan cek kesehatan hewan pada saat tiba dan di daerah tujuan tidak dilakukan karantina Bapak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Saya malah bingung ini. Saya konsultasi kepada yang ahlinya, setahu saya dari tempat asal itu diambil sampel darah, dikeluarkanlah SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan). Sampai di tempat tujuan itu minimal dikarantina 3-4 hari, apakah selama dalam perjalanan terkontaminasi virus PMK bukan sebaliknya. Terus Anda minta tolong sama Perhubungan. Saya baru minggu lalu saya mengobrol sama pemilik kapal, itu enggak bisa karena kapal penumpang itu atau kapal feri itu kalau sudah diubah untuk angkut sapi tidak bisa balik lagi ke angkutan reguler untuk angkutan truk.

Kalau dulu Kementerian Pertanian punya kapal angkut sapi berangkatnya kosong dari Jakarta ke NTB dan NTT, sampai sana nunggu bisa 3-4 hari, berangkatnya kadang 200 kadang anggaplah sekarang memang sangat kebutuhannya sangat tinggi bisa 500 ekor. Coba hitung, Anda hitung, mahal mana bawa sapi dari NTB atau NTT ke Jakarta sama dari Australia atau Selandia Baru ke Jakarta. Hitung saja coba, bisa 1 banding 2.

Saya juga bicara dengan pemilik kapal Feri *kok*. Bisa enggak bantu diubah, enggak bisa karena ketentuannya tidak seperti itu. Kalau izinnya diubah menjadi untuk angkutan hewan, mereka tidak bisa kembali lagi untuk reguler kecuali pakai truk, truknya masuk ke dalam kapal feri. Nah, ini terbalik-balik tempat asal di karantina tetapi tempat tujuan tidak di karantina untuk yang dalam negeri ini. Saya tidak bicara luar negeri. Saya enggak tahu mungkin saya yang kurang pintar atau saya kurang paham. Setahu saya tuh harusnya di tempat tujuan itu paling tidak di karantina 3-4 hari. Kalau Anda mengatakan tadi kalau sapi impor ya itu sudah ada peraturan dan undang-undangnya *kok* karantina. Karantina di mana? Ya, di kandang masing-masing. Siapa yang mengawasi maksimum bobot sapi impor 350 kg, ada yang 400 450 juga enggak yakin saya petugas Anda tahu, apa lagi di pelabuhan panjang sekali bongkar itu ya minimal 20.000, 25.000 ekor. Enggak usah di karantina langsung dipotong dijual saja di LPH ya.

Silakan.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pimpinan, izin.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Saya berharap kita diberikan waktu untuk Fraksi-fraksi memberikan tanggapan karena tadi yang sudah disampaikan Pak Ketua mungkin akan menjadi juga pertanyaan-pertanyaan kami ke depannya. Jadi mohon maaf Ketua, kami berharap hari ini Poksi-poksi bisa memberikan atau Fraksi-fraksi bisa memberikan pertanyaan sehingga pertanyaan-pertanyaan itu mungkin bisa dijawab sekalian oleh Eselon 1 dan Kementerian Pertanian.

Terima kasih, Ketua.

KETUA RAPAT:

Sesuai dengan kesepakatan bersama, fraksi akan bertanya, seluruh Fraksi akan bertanya dan kemudian akan dijawab oleh pemerintah. Setelah itu silakan para Anggota untuk mendalami wajib bertanya dan wajib dijawab. Setelah ada jawaban itu juga wajib ada jawaban tertulis sebagai pegangan atau pedoman ke kita gitu ya.

Jelas Mbak Alien, jelas?

Oke, Pak Dedi silakan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Baik.

Bapak dan Ibu yang saya hormati,

Kita lanjutkan. Yang pertama barangkali mengingatkan seluruh skenario yang dibuat untuk penanganan PMK harus dibuat secara detail, komprehensif termasuk dengan pembiayaannya dan harus dilakukan dengan cepat karena kita berpacu dengan waktu. Apalagi kalau ngomong Idul Adha, itu kan tinggal beberapa hari lagi. Nah, ini yang menjadi fokus kita utama karena ini adalah penyelamatan ekonomi rakyat yang sangat luar biasa.

Yang kedua, Kementerian Pertanian juga harus cepat merespons apa yang terjadi hari ini harga cabai yang meningkat dan kemudian Kementerian Perdagangan dengan sangat cepat memberikan jawaban dalam waktu cepat juga akan menurun lagi harganya. Ini juga harus dijelaskan mekanisme menurunnya melalui mekanisme apa. Apakah ada panen di tempat lain atau mau impor. Kalau impor dari negara mana? Jelaskan secara komprehensif antara Kementerian Pertanian dan Perdagangan.

Jangan sampai selalu terjadi perbedaan pendapat antara kedua lembaga ini atau yang paling penting juga jangan terlalu terjadi terlalu jauh perbedaan pendapatannya, itu jauh lebih penting juga.

Silakan. Kita mulai dari Pak Suhardi Duka. Masih Pak, enggak dikasih in sama yang muda Pak juru bicaranya? Oh enggak.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang saya hormati Pimpinan,
Yang saya hormati Pak Menteri, Sekjen dan Eselon I, Direktur Bulog dan Direktur Pupuk,

Kondisi mendesak bagi semua negara saat ini adalah keamanan pangan dalam negeri. Semua negara melakukan pembatasan ekspor untuk menjaga stok dalam negeri akibat situasi global termasuk mengendalikan atau mengendalikan inflasi dan akibat perang Rusia. Persoalan Indonesia punya keterbatasan dalam stok pangan nasional, akibat keterbatasan gudang Bulog dalam menyimpan jenis pangan utamanya beras. Bulog hanya punya kemampuan menyimpan 3 juta ton ya. Kalau 3 juta ton dikonsumsi 260 juta rakyat Indonesia hanya satu bulan selesai. Saya kira ini ancaman. Dengan demikian ini menjadi perhatian kita bersama.

Yang selanjutnya, ada isu ekspor beras ke China akibat panen dalam tiga tahun terakhir surplus. Saya kira ini cukup menggembirakan kita. Namun, tidakkah dengan paradoks dengan berbagai negara justru membatasi ekspor pangan di tengah situasi yang kurang menentu akibat perang Rusia. Mengapa Indonesia tidak memperbesar gudang penyimpanannya untuk menjaga stok dalam negeri dan Bulog diberikan kapasitas untuk itu. Saya kira ini penting bagi negara. Kalau hanya 3 juta ton Bulog mampu hanya satu bulan ya untung saja kita tidak dalam situasi perang. Kalau kita situasi perang, kita tidak mampu berperang dengan hanya stok. Saya kira ahli-ahli perang harus menyiapkan minimal logistik satu tahun kalau kita ingin berperang.

Yang selanjutnya, PMK kita sepakati situasi mendesak dan kita sudah diskusikan mendalam baik dalam Raker maupun dalam RDP kemarin. Kesimpulannya perlu penanganan cepat tahun 2022 ini tapi alokasi anggaran tidak tersedia. Olehnya itu, kita sepakati ada refocusing 80 Miliar untuk PKH internal dan 100 miliar di Eselon I, total 180 miliar. 180 miliar ini tidak cukup untuk itu, dengan demikian kita pun bersepakat untuk meminta kepada Kementerian Keuangan untuk mengembalikan 1,1 triliun dari *Automatic Adjustment* pertama dan kedua untuk penanganan tahun 2022 dan ini pun belum cukup karena proposal dari PKH 4 triliun. Dengan demikian, kita pun *men-support* untuk anggaran 2023 ada tambahan khusus untuk PMK.

Saya kira ini kita sepakati bersama untuk kita tindak lanjuti dan adapun status mengenai PMK ini saya tidak persoalkan. Yang kami persoalannya adalah bagaimana menangani secara tuntas PMK ini termasuk mengganti

ternak peternak yang dimatikan apabila terkena PMK, karena kalau ini tidak diganti apabila terjadi pemusnahan atau kematian maka tingkat kerugian hanya pada petani tidak ada, tidak ada kehadiran negara di dalam penanganan PMK ini. Untuk itu, kami meminta kepada Fraksi Demokrat untuk dilakukan penggantian bagi ternak yang terkena PMK.

Selanjutnya, Fraksi Partai Demokrat memandang RKA Kementerian Pertanian setelah melalui rapat RDP kemarin telah terjadi pemahaman bersama. Dengan harapan penambahan pagu indikatif kurang lebih 2 triliun untuk tahun 2023, mengingat setiap tahun APBN naik tapi anggaran Pertanian turun terus mulai dari 25 triliun tersisa 13,7 triliun. Untuk itu, 2023 di lain sisi kebutuhan nasional semakin meningkat begitupun alokasi pupuk non kimia juga menjadi kebutuhan petani saat di tengah harga pupuk kimia mahal dan terbatasnya pupuk bersubsidi.

Saya kira ini pandangan Fraksi Partai Demokrat terhadap RKA ini dan saya kira dari hasil Raker dan RDP kemarin telah terjadi kesepakatan yang mendalam dan saya kira semua Fraksi juga akan memiliki pandangan yang sama khususnya dalam penanganan PMK yang kita sepakati.

Demikian Pimpinan.

Terima kasih.

*Wallahul Muwafiq Illa Aqwamin Thariq
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Terima kasih Pak Suhardi Duka yang sudah menyampaikan catatan kritisnya. Dan catatan kritis ini perlu saya ingatkan ya bahwa apa sih *problem* kita hari ini tentang pangan. *Problem* kita hari ini tentang pangan adalah terjadi perubahan desain arsitektur rumah-rumah di desa. Dari desain Arsitektur itu di rumah itu sudah tidak lagi menyediakan gudang dalam Bahasa Sunda dulu saya, *goah*, itu sudah enggak ada, sehingga kecenderungannya adalah ketika panen langsung dijual sehingga simpanan kultur beras di masyarakat itu mengalami penipisan, yang pertama. Yang kedua, di setiap kampung atau desa sudah tidak lagi gudang kayak dulu. Dulu itu gudang ada di desa ada gudang, di kampung ada gudang mulai tingkat RT, RW, dusun sampai desa sekarang enggak ada.

Nah, saya pikir begini *deh* kan bisa Rapat Koordinasi bagaimana kalau Bulog kemudian Kementerian Pertanian bicara dengan Kementerian Desa agar ke depan didorong program badan usaha desa itu segera didorong ke arah pengelolaan pangan di desa, sehingga setiap kampung setiap desa itu punya catatan berapa kemampuan data yang dimiliki tentang ketersediaan pangan. Sehingga *problem* kita ketika menghitung pangan secara nasional kita mengalami kesulitan. Kita ukurannya hanya gudang Bulog. Padahal, dibalik itu

bukan hanya gudang Bulog ada juga beras yang di penggilingan, ada beras yang di bandar-bandar. Nah, itu kita bisa kita buktikan ternyata 4 tahun ini kita tidak impor.

INTERUPSI F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Interupsi, Pak Ketua.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Ini, ini yang yang yang menjadi fokus kita. Harapan saya apa nanti diteruskan oleh Bapak. Harapan saya adalah ini menjadi hal penting ke depan, termasuk mohon pertimbangkan ekspor itu bagus tetapi apakah layak enggak kita ekspor sebelum kita punya perhitungan yang matang tentang ketersediaan pangan nasional. Jangan pas habis setelah ekspor kita nanti kekurangan impor lagi.

Selanjutnya ke Pak Endro. Oh interupsi, silakan.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Sebentar saja Pak Ketua. Ini kan ini kan...

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Sebentar Pimpinan. Ini, enggak enggak, enggak ada interupsi. Kita tadi sudah sepakati sesuai Tatib. Kita diberikan kepada perwakilan Fraksi-fraksi sesuai dengan daftar yang ada di situ, itulah yang berbicara saat ini.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Baik.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Sebentar saja Pak Ketua.

Tadi kan kita sudah sepakat bahwa Pimpinan sudah menyampaikan pokok-pokok pikirannya panjang lebar bahkan waktunya. Nah, sekarang sesinya Anggota Poksi lalu sekarang Pimpinan panjang lagi ceritanya. Saya pikir kasih saja kesempatan...

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Ya ini mau kasih Pak. Silakan Pak Endro.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Jadi menurut saya enggak usah di apa di apa diselak begitu loh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Ya, silakan Pak Endro langsung.

F-P. GERINDRA (Ir. ENDRO HERMONO, M.B.A.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Salam Indonesia Raya.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, serta Menteri Pertanian dan jajarannya dan juga Direktur Utama Bulog, Direktur Utama Pupuk Indonesia,

Fraksi Partai Gerindra menyampaikan beberapa catatan, tanggapan, masukan, dan pertanyaan dalam kesempatan ini. Namun, izinkanlah nantinya catatan-catatan yang banyak ini kami serahkan pada saat sekarang ini hanya berapa poin yang saya anggap layak untuk kami sampaikan.

Yang pertama tadi juga Bapak Pimpinan menyatakan tentang kebutuhan sapi di Idul Qurban cukup banyak. Dinyatakan tadi yang banyak dibahas adalah tentang vaksin dan sebagainya tentang pengobatan penyakit kuku dan mulut. Pertanyaannya yang ingin kami sampaikan adalah bagaimana cara nantinya yang dilakukan oleh Kementan untuk mengadakan kebutuhan sapi yang banyak ini karena kebiasaannya pedagang-pedagang itu membeli di pasar, sedangkan sekarang ini pasar-pasar hewan itu banyak yang ditutup, tidak ada jual beli di sana, sehingga apakah nanti target untuk kebutuhan ini bisa tercapai? Itu yang pertama.

Yang kedua, ini sudah banyak dibahas tadi yang kedua adalah ingin kami tanyakan tentang Dirjen Hortikultura terkait dengan program Dirjen Hortikultura, yakni intensifikasi bawang merah seluas 25 hektar dan intensifikasi bawang putih seluas 13 hektar. Tentunya kita sadar dan tahu bahwa tidak semua daerah ini cocok untuk daerah perluasan bawang putih dan bawang merah. Oleh karena itu, saya minta Fraksi Gerindra meminta bahwa untuk kegiatan-kegiatan bawang putih dan bawang merah ini bisa diganti tanaman obat yang sangat dibutuhkan untuk daerah-daerah yang tidak bisa.

Yang ketiga, terkait dengan program pengadaan motor roda tiga Direktorat Pupuk dan Pestisida. Ini menurut kita ini sangat membingungkan karena manfaatnya itu relatif kecil karena untuk UPPO motor roda tiga sudah satu paket. Sedangkan di daerah di mana tenaga kerja ini sekarang sulit, ini transplanter alat tanam padi ini sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, apakah

tidak memungkinkan adanya pergantian atau diganti yang namanya roda tiga menjadi alat-alat yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Yang keempat yang menjadi polemik antara kementerian dan juga di daerah kebutuhan masyarakat, yaitu tentang *Dryer*. *Masalah Dryer* vertikal 10 ton sebanyak 165 unit, artinya 3 unit per Anggota dengan total alokasi anggaran sebesar 172 miliar dan realokasi 1 unit *Dryer* yang 30 ton menjadi 2 unit *dryer* yang 10 ton, itu ada di rapat-rapat yang terdahulu. Namun demikian, Direktur PPHTP menjelaskan bahwa *dryer* 10 ton hanya 1 Anggota. Ini yang menjadikan debat di pertemuan-pertemuan antara Kementan dengan tenaga-tenaga kita yang mendapat penjelasan itu yang mana juga menjadi aplikasinya di lapangan ini menjadi sulit. Oleh karena itu, mohon penjelasan tentang hal ini. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Nantinya beberapa pertanyaan ini akan kami sampaikan secara tertulis di akhir rapat ini.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, serta Menteri Pertanian dan jajaran yang berbahagia,

Demikian masukan dan pertanyaan ini kami sampaikan dan Fraksi Partai Gerindra atas perhatian dan kerjasama yang diberikan.

Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Terima kasih.

Dari cerita bawang merah dan bawang putih cerita rakyat kita geser ke cerita yang lain dari Garut Selatan. Pak Haerudin mewakili Garut, mewakili Jawa Barat, apa mewakili Fraksi Amanat Nasional?

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H):

Mewakili KIB paling pas, karena Bu Alien nanti pemimpinya.

Terima kasih Pimpinan.

Pak Pimpinan, Anggota yang terhormat,
Pak Menteri beserta seluruh jajaran Kementan, para pejabat Kementan dan mitra-mitra kita dari BUMN, baik PI maupun Bulog dan yang lain yang saya hormati saya cintai saya banggakan,

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Sampurasun.*

Ada berapa hal Pak Menteri ingin kami sampaikan. Pertama, kita bersepakat bahwa sebelum ini digelar ada pembicaraan awal dari sisi

membicarakan pagu indikatif. Saya pikir setiap Poksi setiap kita bisa bicara jauh lebih simpel karena kita sudah ada kesepakatan-kesepakatan awal.

Yang kedua, Pak Menteri tentu kita berharap pertama Pak Sekjen, apa yang kita sepakati urusan ruang bagaimana kita berkarya bersama-sama kok jadi ini berkarya kita menyebutnya sekarang gara-gara kita ber-KIB ini. Karena jadi apa yang kita sepakati tentang ruang aspirasi yang memang Anggota menjadi bagian dari titik-titik yang bisa percepatan program kita itu tidak berubah apa yang disampaikan oleh Pak Endro tadi karena di lapangan apa dari penjelasan-penjelasan yang ada di kementerian jadi selalu berbeda dengan apa yang kita sepakati. Itu di-*minimize* biar tidak terlalu rumit hal-hal yang teknis begitu. Jadi sering tidak bersambungan antara apa yang kita sepakati dengan para direktur yang apa menjelaskan di lapangan mengundang TA-TA Anggota. Itu mohon untuk tidak banyak perubahan karena memang makin panjang lagi cerita-cerita kita ini.

Yang ketiga, Pak Menteri persoalan saya memang walaupun orang banyak menyebut bahwa PMK ini adalah bagian dari akibat karena kelalaian setiap dan semua kita bangsa ini tentang masuknya barang ke kita, sehingga kita lalai dalam konteks bagaimana memfilter dari virus-virus itu adalah bagian dari kelalaian kita tapi kalau sudah menyebar seperti ini saya menyebutnya ini adalah sebuah bencana. Jadi kalau sebuah bencana di luar kemampuan kita. Contoh waktu kita Covid, Covid itu orang menyeleksi memfilter bangsa kita agar tidak masuk ke kita. Sampai cerita Ashanti lah waktu itu ke Turki sampai menyebar besar jutaan di kita. Itu kan kalau sudah jutaan yang masuk sudah bencana namanya. Nah, makanya ke depan itu posisi di pagu indikatif anggaran ini bagaimana PKH ini persiapan perhatian dengan Keswan dan kita kan selalu pengadaan sapinya yang kita bicarakan, sementara memelihara sapinya kita enggak bicarakan secara maksimal. Bagaimana pengobatannya, bagaimana kesehatan hewannya, bagaimana dokter-dokternya, bagaimana prasarannya kan kita enggak pernah bicarakan secara baik. Selalu kita lalai dan alpa. Hari ini baru kita kebingungan. Mohon jadi perhatian mumpung kita masih membicarakan pagu indikatif ini.

Pak Menteri yang selanjutnya kita berharap apa gagasan Kang Dedi tentang bagaimana pemetaan pangan di tingkat desa. Ini dulu ini zaman ilmunya zaman Pak Harto. Bisa jadi di ruang politiknya kita membenci Pak Harto waktu itu sebagai aktivis bahwa (*suara tidak jelas*) pun anti Pak Harto tapi secara objektif kita butuh pengakuan, butuh mengakui secara baik bahwa Pak Harto punya kemampuan me-*manage* pangan kita sampai kita punya kemampuan surplus yang pangan kita itu baik padi, baik jagung, dan yang lain sehingga kita menjadi Macan Asia waktu itu dan itu kekuatan Pak Harto di desa. Tidak ada desa tanpa, tanpa Bumdes tanpa KUD waktu itu dan ada bangunannya, ada sarana prasarannya, jadi serius kita itu. Jadi kalau kostratani didorongnya di situ, pengamatan kita tentang padi kita punya data di lapangan bukan lagi angka-angka di atas yang pada saat kita cek ke lapangan sering kita tidak dapatkan, tapi kalau dari desa *Insyah Allah* itu akan menjadi lebih baik.

Nah, ini ingin bagaimana cara tahapan kita mendorong agar peta pangan itu ada di desa. *Insya Allah* menjadi kekuatan kita *toh* pada kenyataannya dua tahun Covid ini berjalan yang hebat itu pangan, yang bertahan itu pertanian, yang menyumbang pada ruang kerja publik agar apa menarik publik bisa bekerja, ruang pertanian, yang menambah pertumbuhan ekonomi kita pertanian, apalagi yang salah? Maka kalau kita dengan bersemangat semua Komisi IV mendorong pertanian agar bertambah anggarannya bukan hanya persoalan PMK, tapi kesadaran bahwa bangsa kita bertahan di ruang ini di pangan ini di pertanian ini dan tentu dengan segala kelengkapannya, segala sektornya yang terintegrasi bagaimana ke depan pangan kita Berjaya.

Yang terakhir Pak Ketua, Pimpinan sama Pak Menteri,

Apa yang kami sampaikan dulu kalau kebijakan kita mencabut subsidi yang lain kecuali NPK dan urea, kami ingin tahu evaluasinya sampai per detik hari ini, ini akan seperti apa resiko kita ini? Kalau saya secara pribadi memang saya ini ideologis urusan, urusan organik itu dan saya, dan saya ini dari dulu jadi kalau secara pribadi baik dari sisi keilmuan baik dari sisi keyakinan, organik adalah masa depan tanah kita, masa depan pertanian kita, masa depan lingkungan kita. Saya sudah selesaikan itu ideologis bagi saya, tidak ada tawar menawar lagi. Makanya kita butuh dulu kita ke Pak Wakil Direktur PI minta apa dampaknya setelah kita kurangi itu, bagaimana produksi pertanian kita.

Kira-kira itu yang dapat kami sampaikan dari Fraksi PAN, Pak Dedi. Mudah-mudahan apa ke depan kita lebih baik. Ya saya berdoa Pak Menteri sukses di Kementannya. Apapun badai yang menghadapi ya begitulah cerita orang tidak ada orang yang disebut pelaut yang hanya berlayar di muara kecil.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Terima kasih pada “penantang badai” ya kan. “Jangan bangun rumah di tepi pantai kalau takut diterjang ombak”. Jangan jadi Menteri kalau takut dikritisi dalam setiap waktu.

Nah, dari Jawa Barat sebelah selatan kita geser ke Jawa Barat sebelah timur walaupun mewakili Fraksi PDI Perjuangan. Tadi Pak itu lagi deketan sama Mbak Alien kayaknya.

Silakan. Pak Sutrisno silakan.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi, dan
Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Pimpinan, Pak Menteri beserta jajaran, para Direktur BUMN Pangan, rekan-rekan Anggota,

Dari Fraksi PDI Perjuangan, Pak Menteri, tugas pokok fungsi Kementerian Pertanian adalah bagaimana mewujudkan pangan yang berkecukupan dan tentunya bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat petani sebagai produsen. Itu semua tentunya perlu diaplikasikan pada rencana kerja kita kepada Pagu Indikatif 2023 dan pagu indikatif ini pun juga penjabarannya harus mampu menjawab persoalan pangan yang kita hadapi. Ada persoalan-persoalan yang kita hadapi yang harus direalisasikan solusinya penyelesaiannya di 2023. Yang pertama adalah PMK, yang kedua adalah *Food Estate*, yang ketiga adalah peluang untuk ekspor beras dan peluang untuk ekspor daging ayam.

Oleh karena itu, dari yang pertama Pak Menteri, dari awal semua pihak mengingatkan pada kita waspada tentang apa namanya wabah PMK ini. Orientasi solusi yang dilakukan lebih pada bagaimana memberikan keyakinan pada rakyat bahwa rakyat bahwa PMK ini tidak menular pada kesehatan manusia. Nah, penanganan ya bagaimana pengembangan peternakan yang berdampak pada ekonomi ini masih belum begitu apa namanya progresif menanganinya, sehingga perkembangan wabah PMK ini begitu luar biasa dari awal 6.720 apa namanya ekor yang ter apa nama terdampak. Rapat kemarin sudah mencapai 14 juta lebih. Ini sangat luar biasa dan oleh karena itu Komisi IV...

KETUA RAPAT:

Pak Sutrisno, populasi akan terdampak 14 juta bukan yang kena PMK supaya supaya jangan jangan rancu nanti.

Hanya koreksi saja.

Terima kasih.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si):

Terima kasih, Pak Pimpinan.

Artinya manakala kita tidak menangani pasti ini kan akan akan menjadi kenyataan. Nah oleh karena itu, Komisi IV dalam rapat kemarin kan sudah menerima ya menerima usulan realokasi anggaran tadi 180 miliar ini kan juga kan berdampak pada program kita terganggu. Ya, program kita yang untuk rakyat ini pasti terganggu.

Yang kedua, patut dihargai Komisi IV juga berinisiatif untuk mendukung pemerintah ya mengembalikan *Automatic Adjustment* pada tahap kedua sampai 1,171 triliun. Itu sebagai tanggung jawab Komisi IV kepada rakyat sebagai representatif rakyat bagaimana keluh kesah rakyat itu kita dorong segera penyelesaian. Nah, yang menjadi persoalan adalah yang kami juga

belum tahu persis bagaimana pola skema yang akan dilakukan dalam memanfaatkan anggaran yang begitu besar ini.

Pak Menteri, Pak Sekjen, Pak di apa namanya Dirjen Peternakan PKH, selama ini di daerah sepertinya tidak terbuka bagaimana kondisi apa namanya PMK di daerah tapi begitu anggaran ini dikeluarkan pasti akan berbondong-bondong mengusulkan kepada pemerintah untuk mendapatkan fasilitas ini. Oleh karena itu, ya bagaimana skema kita apa namanya menangani PMK ini pemanfaatan anggaran yang begitu besar ini mohon untuk dirancang dengan baik agar tidak lagi terjadi apa nama pembiasan penggunaan anggaran. Anggaran-anggaran ini agar untuk dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan PMK ini sehingga petani peternak tidak lagi menangis dan pesan kami jangan anggaran ini dijadikan objek proyek oleh siapapun.

Yang kedua, Pimpinan, Pak Menteri, terkait dengan *Food Estate*. Kami mencatat sejak dimulai program ini sampai saat ini sampai rencana tahun 2023 itu mencatat anggaran 1,596 triliun ya 2021 761,5 miliar, 2022 739 miliar, 2023 96,85 miliar, totalnya 1,596 triliun. Yang ingin kami persoalkan Pak Menteri ya pola pengembangan pertanian di kita itu ya sangat padat tenaga kerja. Nah oleh karena itu, manakala ini mengandalkan aplikasinya kepada rakyat mengelola kayaknya agak sulit bisa bisa dicapai apalagi nan jauh di sana, transmigrasi pun juga tidak tidak dijalankan lagi. Tenaga kerja dari mana? Nah oleh karena itu, akan lebih baik mana kala program ini akan diteruskan serahkan pada pemerintah silakan jadikan lahannya. Sudah jadi dan bisa memproduksi, baru serahkan pada rakyat. Nah oleh karena itu, menurut hemat kami, Kementerian Pertanian agar tidak masuk dulu ke sana ya. Lebih baik mengembangkan intensifikasi yang tinggal bagaimana mendorong peningkatan produksi. Ini persoalan yang dihadapi dalam konteks kita membangun pangan di negeri kita ini sehingga pangan-pangan kita karena padat tenaga kerja itu tidak bisa bersaing dalam konteks harga dengan barang-barang dihasilkan dari dari impor itu. Ini mohon agar Pak Pimpinan ya Panja *Food Estate* untuk difungsikan agar kita bisa mengkaji, kita bisa mengontrol seperti apa sih yang sudah berjalan di masing-masing lokasi supaya jelas langkah apa namanya Komisi IV ini.

Kemudian yang ketiga Pak Menteri, terkait dengan kenaikan apa namanya harga apa namanya pangan kita. Terus terang saja kenaikan harga pangan ini tidak dirasakan oleh petani. Sebut saja beras, harga beras masa panen di bawah Rp4.000,- tapi kenyataannya di pasar tetap saja di atas Rp10.000,- yang menikmati ini bukan petani itu, yang menikmati ini adalah para pialang-pialang jembatan yang menerima itu. Oleh karena itu, ini usulan ya agar di Kementerian Pertanian tidak hanya mendorong produksi agar Kementerian Pertanian menghadirkan apa penampung hasil produksi pada harga yang yang layak sehingga petani menerima harga yang layak. Manakala itu tidak dilakukan, petani pasti akan menjual berapa pun harganya karena hakikatnya petani itu ingin dapat Rupiah untuk bisa menggarap kembali karena pada umumnya petani kita adalah petani penggarap.

Dalam kaitannya dengan peluang atau permintaan dari Cina untuk, untuk meminta beras kita 2,5 juta ton, saya hanya ingin mendalami dari yang

Pak Menteri rencanakan ya. Tahun 2022 direncanakan kan produksinya 55,20 juta ton gabah. Di tahun 2023, Pak Menteri hanya merencanakan 54,5 juta ton. Kalau dikonversi dengan beras dengan rendemen 60%, itu beras kita hanya ada sekitar 31 juta ton. Mohon berhati-hati dalam konteks adanya permintaan ini. Jangan kemudian akhirnya balik lagi kita. Pada saat mengimpor negara lain menyedot akhirnya kita akan terjadi kekurangan pangan.

Kemudian peluang untuk ekspor daging ayam. Ini yang tentunya perlu diseriisi, ini artinya yang perlu diseriisi untuk menjawab persoalan keluh kesah petani apa namanya ternak rakyat kita yang kemarin pun juga memprotes harganya menurun ya dan karena kita juga *over* produksi luar biasa. Manakala ini bisa direalisasikan, dipastikan akan bisa mengungkit membantu apa namanya petani ternak rakyat kita mendapatkan harga yang layak. Pada posisi kondisi sekarang PMK tentunya juga pemerintah Kementerian Pertanian bisa memanfaatkan daging ayam sebagai pengganti daging sapi maupun daging lembu.

Kemudian Pak Menteri Dirjen PKH, ini saya juga kaget juga ini ya, rencana Kementerian 2023 yang tadi juga disampaikan Pak Menteri bahwa produksi daging sapi kerbau kita 465 ribu ton, 2021 463,21 artinya apa? Sekarang terjadi peningkatan pada posisi, pada posisi ternak-ternak kita kena wabah PMK ya. Ini dari mana dasarnya, dari mana dasarnya pada kondisi kita kekhawatiran kekurangan daging produksi dalam negeri, rencananya malah lebih besar daripada apa yang direncanakan pada tahun 2022 ini. Ini pencerminan ya dasar analisis kita tentunya tidak berdasarkan fakta yang berkembang di masyarakat. Mohon untuk dikaji kembali dampak daripada ini semua pasti kaitannya dengan penganggaran.

Kemudian Pak Menteri terakhir, Alsintan tadi (*suara tidak jelas*), saya kemarin baru saja ke lapangan bersama TV Parlemen ya justru ada gugatan dari para kelompok tani diberikan alat yang modern karena tidak diberikan bimbingan, akhirnya justru bukan mengurangi beban biaya tapi justru menambah beban biaya karena tidak tahu memanfaatkannya. Oleh karena itu, setiap kali pemberian bantuan alat Alsintan ini agar ada sosialisasinya dari supliernya supaya pemakai ini sungguh-sungguh bisa maksimal dimanfaatkan. Jangan kemudian akhirnya menjadi besi tua.

Kami kira itu yang ingin kami sampaikan ya terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Wa'alaikumsalam

Terima kasih dari Jawa Barat Timur, sekarang ke nyebrang ke Lampung mewakili Fraksi Golkar Bandar Lampung.

Silakan.

F-PG (Ir. H. HANAN A. ROZAK, M.S.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang saya hormati,
Pak Menteri dan jajaran Eselon I, Dirut Bulog, Dirut PIHC, Dirut ID FOOD ya yang saya hormati,

Pertama terkait dengan PMK, Pak ini dari Pak Dirjen PKH sudah membuat kebutuhan untuk menangani PMK ini pada tahun 2022 di angka yang maksimal Pak ya terkait dengan sasaran populasi yang divaksin itu mencapai anggarannya 4,4 triliun ya, ini kalau semuanya divaksin yang kemungkinan berdampak. Saya kira ini sudah harus kita rencanakan seperti ini Pak karena yang namanya PMK ini barangnya sudah masuk, penyakitnya sudah sampai ke kita, tidak ada pilihan adalah harus dikendalikan. Cara mengendalikan PMK adalah semua yang belum terinfeksi itu divaksin. Kemudian yang sudah terinfeksi diobati. Setelah sembuh dipotong yang sudah terinfeksi kan begitu Pak ya baru tuntas. Kalau tidak ya tidak tuntas-tuntas sampai berapa puluh tahun pun tidak akan tuntas. Jadi asumsi saya kalau seandainya ini dianggap darurat nantinya oleh pemerintah seperti penanganan Covid di angka 4,4 triliun ini *Insyah Allah* mudah-mudahan bisa mengatasi ya secara tuntas persoalan PMK di bumi Indonesia ini ya. Saya kira ini jadi pegangan kita. Tadi kita sudah mendapat laporan untuk tahap pertama ada 3 juta berarti masih banyak, masih banyak yang harus kita selesaikan baik di 2023, kalau angka 4,4 ini tidak bisa disetujui di 2022 artinya apa, kita akan bekerja beberapa tahun ini Pak ya. Oleh karena itu, kami minta perhatiannya terkait dengan perencanaan untuk tahun 2023 tentunya.

Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati,

Terkait dengan apa namanya mengatasi persoalan berpengaruhnya hama penyakit terhadap produksi bukan hanya di ternak saja ya, termasuk di tanaman pangan dan Hortikultura. Ini Pak menteri sudah membuat apa namanya perkiraan-perkiraan target untuk 2023 misalnya saja sapi 465,15 ribu ton ya untuk daging sapi, kerbau. Tentunya dengan adanya PMK ini mungkin perlu dikoreksi target-target seperti ini. Begitu juga padi dan lain-lainnya ada bawang merah, jagung dan sebagainya manakala ada gangguan terhadap penyakit maupun hama tentunya ini akan berdampak terhadap produksi.

Jadi untuk mengamankan produksi salah satunya adalah kita harus adanya kesiapsiagaan terhadap serangan hama penyakit, bukan hanya PMK mungkin yang akan datang ke bumi Indonesia ini. Gejalanya sudah kita lihat contohnya saja di NTT kita lihat sudah ada serangan hama secara eksplosif ya hama belalang. Manakala eksplosif, manakala sudah menjadi wabah, itu sudah tugas pemerintah. Pemerintah harus hadir di tengah-tengah petani kita kalau sudah eksplosif maupun, maupun apa namanya wabah.

Nah, untuk itu untuk tanaman pangan ini Bapak Dirjen Tanaman Pangan kami minta mohon informasinya terkait dengan kesiapsiagaan pengendalian hama penyakit, Pak. Tidak tutup kemungkinan dengan kondisi agro klimat yang ekstrem ini ya kemungkinan di tahun-tahun berikutnya kita akan menghadapi situasi seperti di hewan juga Pak nanti ada mungkin serangan wereng yang eksplosif, Bapak sudah targetkan 54 juta ton bahaya ini Pak kalau tidak kita siap. Karena apa? Pemerintah harus siap manakala ada serangan nanti seperti Pak Ketua tanyakan mana vaksinnya, mana karena tidak siap. Oleh karena itu, di tanaman pangan saya minta ini Pak 2023 diberikan perhatian ya terhadap kesiapsiagaan untuk menghadapi penyakit maupun hama tanaman baik tanaman pangan maupun horti itu Pak ya peralatannya juga Pak.

Kemudian yang kedua, apa yang kita diskusikan kemarin cukup panjang terkait informasi data penyakit data serangan hama, kemudian data produksi dan sebagainya itu karena adanya kelemahan-kelemahan yang saya lihat adalah di tingkat lapangan, Pak. Di tingkat lapangan, kelembagaan penyuluhan kita baik Balai Penyuluh Pertanian maupun Puskesmas ini sudah kurang berfungsi ya atau fungsinya sudah mulai menurun ya. Untuk itu ke depan ini harus diberikan perhatian. Bapak Presiden sudah memberikan perhatian ini Pak mengingatkan kita, sudah mengeluarkan Perpres Nomor 35 Tahun 2022 terkait penguatan lembaga penyuluhan.

Nah, ini saya kira adanya Perpres 35/2022 ini harus direspons Pak. Direspons bukannya anggaran penyuluhannya diturunkan, anggaran kelembagaan penyuluhan diturunkan tapi harus ditingkatkan. Perpresnya sudah terbit untuk penguatan penyuluhan baik di tingkat WPP maupun di tingkat lapangan Poktan ya. Untuk itu mohon perhatian Pak Menteri dan BPDSDM mungkin ya untuk memberikan perhatian terhadap Perpres ini tindak lanjutnya apa? Di situ ada penguatan kelembagaan, penguatan apa namanya SDM dan sebagainya. Saya kira ini harus direspons supaya apa yang kita alami selama ini kita mau tahu di Kecamatan mana, di desa mana ada saat ini sedang ada serangan PMK saja sulit karena tidak bekerja ini kelembagaan di bawah.

Kalau zamannya mohon maaf zaman orde baru dulu zaman Pak Harto dulu cepat sekali Pak. Ada PMK tidak perlu buat-buat Satgas lagi Pak. Seperti PMK ini tidak perlu buat Satgas lagi karena lembaganya di bawah sudah, sudah ada sebenarnya. Di situ ada Puskesmas, ada WPP tinggal bagaimana kita mau memfungsikan mengoptimalkan lembaga yang ada ini supaya tertib ini. Saya kira Perpres 35 Tahun 2022 ini di 2023 harus direspons Pak dengan dukungan anggaran tentunya ya supaya ini bisa operasional.

Saya kira ini Pak sekedar tambahan dari saya supaya mendapat perhatian. Harapan kita adalah PMK ini bisa selesai Pak. Kalau pun tidak selesai berarti tahun 2023 kita siapkan lagi Pak karena tidak ada pilihan bahwa yang belum terjangkau PMK harus di divaksin vaksinnya dua kali ini perencanaannya sudah dua kali lipat ya dari 14 juta populasi sudah 28 juta berarti sudah dua kali vaksin ya. Tidak ada pilihan Pak seperti Covid-19 tidak ada pilihan vaksin begitu vaksin selesai. *Insyah Allah* ini selesai begitu juga ini. PMK kalau tidak vaksin tidak dilakukan terhadap ternak-ternak yang belum terjangkau ya ini tidak akan selesai PMK sampai berapa puluh tahun juga ya.

Kemudian yang sudah terkena diobati sembuh dipotong. Pilihannya itu Pak dipotong ya atau dijual kemudian dipotong. Kalau tidak ya terus saja Pak. Dari Pak drh. Slamet saya dapat informasi walaupun sudah sembuh katanya dua tahun masih bercokol itu apa namanya virusnya di dalam ternak kita. Untuk itu ini supaya menjadi perhatian di 2023. Kalaupun hanya kita bisa di 2022 ini 3 juta, 2022 harus kita selesaikan Pak ya. Kita selesaikan untuk yang sampai 14 juta apa namanya sasaran populasi.

Demikian.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Baik.

Terima kasih ya.

PMK ini kuncinya di PMK, jadi penanganan PMK ini akan selesai vaksin segala macam, sekali lagi kalau ada PMK, yaitu Peraturan Menteri Keuangan ya kan. Intinya kan belum ada PMK baru. Jadi untuk segera Pak Sekretaris Jenderal *lobby* Menteri Keuangan dan Dirjen Anggarannya agar keluar PMK untuk penanganan PMK. Jadi PMK dituntaskan dengan PMK. Kalau PMK menurut Bapak Trisno Pamanukan tadi malam ulang tahun. Terima kasih.

Sekarang Pak, kita geser ke Jawa Barat sebelah barat Sukabumi yang ahli di bidangnya drh. Slamet. Sekarang hewannya lagi menunggu keselamatan.

Terima kasih.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Pimpinan yang saya hormati, Rekan-rekan Anggota Dewan yang saya hormati, Pak Menteri beserta seluruh jajarannya yang saya hormati, mudah-mudahan selalu sehat semuanya.

Baik.

Ada beberapa hal yang pertama saya juga sama masih konsen di PMK. Jadi setelah kita mendapatkan angka yang pasti ternyata angka itu tidak besar-besar juga begitu. Jadi 4 koma berapa kemarin Pak Sekjen, 4,2 4,4 ya 4,4 triliun. Oleh karena itu, dari ruang yang terhormat ini saya ingin menyampaikan begitu ya kepada Presiden ini terus terang ya sudah dikorek-korek dari mana dana dari internal Kementan segitu-segitunya enggak akan mampu, sehingga saya sampaikan kepada Presiden dari ruang terhormat yang sama-sama dipilih

oleh rakyat, Anggota Dewan dipilih oleh rakyat, Presiden dipilih oleh rakyat. Kalau dengan uang 4 sampai 5 miliar ini tidak bisa mengadakan tahun ini...

KETUA RAPAT:

Triliun, triliun.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Ya mohon maaf. Untuk uang 4 sampai 5 triliun tidak bisa mengadakan hari ini untuk menyelesaikan PMK, tunda itu IKN ya. Uang triliunan di sana ini tidak berpengaruh langsung kepada kesejahteraan rakyat kita khususnya peternak kita diumbar ke sana untuk IKN, tapi untuk 5 triliun. Bahkan, 4 koma sekian tidak sampai 6 triliun, kita susah nyarikan uang untuk Kementan ini. Ini hal yang harus realistis kita. Sehingga dari ruang terhormat ini saya sampaikan kepada Bapak Presiden bentuk kepedulian Presiden kepada rakyat kita peternak kita adalah tangguhkan itu kalau enggak punya uang geser untuk kemudian penyelesaian PMK.

Ini mungkin pernyataan dari kami terkait dengan susahnyanya kita mencari anggaran dari dari Kementan karena segitu-segitunya ya. Jadi ini kita harus realistis dan sisi lain, mohon maaf Pak Menteri ini bukan membela tapi memang ini realitasnya begitu ya. Kalau hari ini kita kucek-kucek terus Kementerian tampaknya sudah lecek tapi kita masih lupa ujung awal untuk membuka kran masuknya penyakit ini juga harus di-stop. Itu juga harus jadi catatan kita semuanya. Maka impor dari negara-negara yang tidak bebas PMK harus di-stop. Ini dari awal sejak saya masuk ke Komisi IV sudah saya sampaikan. Oleh karena itu, ini untuk kepada Komisi lain mungkin juga kemudian lembaga lain yang terkait dengan impor tolong ini diperhatikan.

Mau sekarang, kalau sudah kejadian baru Kementan sekarang yang diucek-ucek walaupun memang ini konsekuensi jabatan Pak Menteri saya juga mengucek-ngucek lagi ini. Jadi setelah saya dorong kemudian untuk dibuka beberapa anggaran. Jadi sekali lagi 4,5 triliun itu kecil untuk peternak kita bagi sebuah negara Indonesia NKRI untuk kemudian pembelaan kepada peternak kita, ini yang pertama.

Yang kedua Pak Menteri, saya juga tadi belum disinggung juga saya pikir ini penting untuk menjadi kesimpulan jadi penyelesaian itu kan 4 triliun, kalau bisa di tahun ini kenapa harus diundur. Jadi saya dalam pidato pengantar tadi tidak menemukan Pak Menteri mengajukan penyelesaian secara apa cepat untuk dana 4 triliun itu ya.

Yang berikutnya ya ini apa saya juga terkait dengan catatan saya, Pak Menteri itu pendataan. Tolong pendataan diperbaharui, bagaimana mencari data yang benar ya. Kita semuanya Anggota Dewan pasti merasakan itu mendapatkan masukkan langsung di WA kejadian-kejadian kematian itu luar biasa. Di Dapil saya juga luar biasa Pak, tapi datanya landai-landai saja jadi mohon diperbaiki untuk kemudian mencari datanya.

Yang terkait dengan momen kurban ini tolong saya ingin mendapatkan gambaran skenario yang jelas Pak. Kalau di edaran kementerian kan disarankan untuk dipotong melalui RPH milik pemerintah yang setahu saya tidak hanya kemudian fasilitasnya yang memang okelah anggap fasilitasnya memadai tapi ketersediaannya itu kan tidak memungkinkan Pak saran itu secara teknis untuk dilakukan. Pemotongan-pemotongan hewan kurban yang terjadi itu kan pasti bahkan di rumah-rumah mungkin dikelompokkan di masjid. Kalau kemudian harus dibawa ke RPH yang rata-rata per kabupaten mungkin tidak lebih dari 2 itu secara teknis menyulitkan Pak. Sehingga saya ingin mendapatkan gambaran teknis berikutnya.

Usulan saya Pak, mohon disiapkan dokter hewan sebanyak-banyaknya bisa melibatkan juga kampus atau anak-anak koas untuk diterjunkan ke masyarakat mendampingi para panitia kurban, ini yang saya pikir secara teknis sangat mungkin. Ya kalau edaran itu dilaksanakan, saya membayangkan Dapil saya juga sulit Pak Dedi RPH-nya itu hanya ada satu di kota, satu di Kabupaten. Saya 4 jam ke Dapil paling ujung kalau kemudian memotong sekian ribu kurban kan rata-rata kalau di Jawa Barat kurban itu di satu kecamatan bisa ribuan, Pak. Dibawa untuk dipotong di RPH pemerintah enggak akan memungkinkan itu, sehingga mohon itu kemudian jadi catatan kita semuanya. Itu yang menjadi catatan saya terkait dengan PMK.

Satu lagi Pak Menteri, saya pikir ini bukan masalah gengsi tetapi menaikkan status menjadi KLB ini menjadi harus diperhitungkan dikaji lebih dalam dan menurut saya ini sangat cocok dalam rangka tadi supaya ada penanganan-penanganan secara anggaran juga bisa lebih mudah untuk kemudian kita dapatkan.

Dan yang terakhir saya juga menyerukan dari tadi disampaikan beberapa teman-teman kita terkait dengan mahalnya harga cabai Pak disampaikan oleh Pak Sutrisno juga. Jadi memang betul mahalnya harga cabai itu tidak dirasakan oleh para petani kita dan saya mendapatkan data langsung ternyata HPP-nya juga sudah meningkat Pak. Jadi memang harga cabai meningkat HPP-nya juga meningkat. Ini ini tadi pagi saya mendapatkan WA langsung dari petani saya. Mulsa yang biasanya Rp600.000,- menjadi Rp750.000,- insektisida yang Rp40.000,- menjadi Rp50.000,- fungisida yang Rp60.000,- menjadi Rp90.000,- herbisida Rp60.000,- jadi Rp170.000,- pupuk non subsidi dari Rp450.000 menjadi Rp850.000,-. Artinya tadi, memang naik tetapi petani tetap-tetap juga sengsara. Nah, ini mohon menjadi perhatian kita semuanya dari seluruh kementerian baik nanti Kementerian Pertanian maupun Kementerian Perdagangan.

Pak Ketua, saya usul masalah cabai ini sebagaimana Pimpinan dulu sudah luar biasa tentang minyak goreng mengusulkan Rapat Koordinasi, diusulin lagi Pak biar di media sudah mengemukakan "akan turun". Nah, usul kepada Pimpinan untuk menginisiasi lagi sebagaimana kehebatan Pimpinan Komisi IV kemarin menginisiasi untuk Rapat Koordinasi terkait dengan minyak. Kita panggil untuk rapat koordinasi terkait dengan cabai.

Demikian Pimpinan yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Slamet masukannya.

Jadi kalau kita lihat kan petani cabai ini menderita sekali Saudara Dirjen. Tolong dialokasikan disisipkan anggaran untuk membantu mulsa dan lain-lain ya, itu yang pertama.

Yang kedua, Pak Slamet, harga cabai tadi Pak Slamet mengatakan dari Kemendag harganya turun di media. Memang turun dari truk ke pasar. Kalau memang sesuai kesepakatan oleh seluruh Anggota Komisi IV, saya kan bersurat lagi. Saya tidak akan pernah bosan bersurat.

Hah? Ah Itu kan cuma katanya.

Silakan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Baik.

Terima kasih Pak Slamet yang telah memberikan koreksi.

Kalau menurut saya sih koreksinya juga tidak, tidak usah terlalu jauh juga di lingkaran Kementerian yang ada lingkup Komisi IV juga bisa mengkoreksi. Misalnya *Food Estate* itu digeser saja untuk penanganan PMK itu kan kalau dikumpulin di semua kementerian tuh lumayan itu nanti ditambah-tambah yang lain karena ini sebuah darurat yang harus ditangani secara bersama dan sungguh-sungguh. Hal yang paling realistis menurut saya adalah itu.

Nah yang selanjutnya agar selamat, kita geser lagi harus berserah diri pada Allah, Pak Abdullah Tuasikal. *Abdullah* itu kan abadinya Allah, orang yang berserah. Silakan.

F-P. NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan Anggota,
Yang saya hormati Pak Menteri beserta jajarannya, Pak Direktur Bulog, Pak Direktur Pupuk,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Di hari yang sangat berbahagia ini *Insyah Allah* kita semua dalam keadaan sehat walafiat, kita semua bahagia, dan *Insyah Allah* Rapat Kerja hari ini kita bisa menyelesaikan skala-skala prioritas khususnya untuk kepentingan masyarakat. Apalagi wabah PMK ini telah menimbulkan kekhawatiran bagi peternak.

Untuk itu, saya mewakili Fraksi Partai Nasdem ada beberapa hal yang kami perlu sampaikan bahwa pertama wabah PMK telah menimbulkan kekhawatiran bagi peternak, pedagang, dan masyarakat. Tentu saja dibutuhkan respons yang cepat untuk mengendalikan dan menekan penyebaran agar tidak meluas dan menimbulkan kerugian ekonomi yang semakin berat. Fraksi Partai Nasdem mengapresiasi rencana aksi Kementerian Pertanian dan menerima usulan Refocusing Anggaran Tahun 2022 untuk kebutuhan penanganan PMK.

Poin 2, Fraksi Partai Nasdem mendorong Kementerian Pertanian untuk mempercepat pengadaan vaksin dan segera melakukan vaksinasi massal dengan memprioritaskan hewan ternak yang belum terdampak PMK dalam kondisi darurat. Vaksin (*suara tidak jelas*) dipahami sebagai solusi jangka pendek sambil terus mengembangkan vaksin produksi Pusvetma.

Ketiga, pada bulan Juli kita akan menghadapi Hari Raya Idul Adha yang selalu diikuti dengan peningkatan kebutuhan akan hewan untuk kurban. Tentu saja mobilitas hewan ternak juga akan semakin meningkat. Untuk itu, Fraksi Partai Nasdem mendorong Kementerian Pertanian menyiapkan sarana yang memadai untuk memperketat pengawasan lalu lintas ternak terutama pada wilayah terdampak PMK untuk mencegah penularan semakin meluas.

Keempat, terkait dengan kenaikan harga beberapa komoditas pangan yang sedang terjadi terutama lonjakan harga aneka cabai, Fraksi Partai Nasdem mengharapkan langkah antisipasi dari Kementerian Pertanian untuk tanaman Hortikultura yang produktivitasnya sering kali menurun akibat perubahan musim cuaca, sehingga mengalami lonjakan harga karena pasokan tidak stabil. Fraksi Partai Nasdem mendorong Kementerian Pertanian memaksimalkan Kampung Hortikultura dan optimalisasi pemanfaatan lahan melalui Program Pekarangan Pangan Lestari. Selain itu distribusi komoditas dari sentra produksi ke daerah yang defisit pada saat perubahan musim atau kondisi cuaca tertentu perlu dipercepat sehingga ketersediaan pasokan tetap terjaga dan merata.

Pak Menteri yang saya hormati, saya banggakan,

Bahwa sejak 2019, sekarang sudah 2022, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Kementerian apakah Peternakan, Perkebunan, Hortikultura selalu kita bahas dan *Insyah Allah* pembahasan-pembahasan ini sebenarnya harus selalu meningkat ya. Dari 2019 sampai 2022, ini saya kira kita semua jalan di tempat. Untuk itu, perlu ada peningkatan ya peningkatan kualitas dari kegiatan pembangunan yang terkait dengan Kementerian. Kita sadar bahwa Kementerian Pertanian ya dana KUR tadi sekitar 13 koma sekian triliun. Timbulnya masalah-masalah seperti ini ya terus terang kita semua prihatin.

Siapa yang mau disalahkan ya padahal ini semua untuk kepentingan rakyat. Harapan kita menurut saya ya sebagai Anggota DPR RI tugas untuk mewakili masyarakat dan untuk kepentingan negara ya bukan apa kepentingan ya saya mau bilang orang per orang, kelompok, saya juga tidak tapi harapannya harapan kita harapan masyarakat itu agar negara ini lebih baik. Saya yakin itu negara ini kunci ada pada pelaksanaan Pemerintahan Kementerian ada di negara kita ini.

Untuk itu, saya mengharapkan itu agar kegiatan-kegiatan RDP kita memiliki kesimpulan Raker kita memiliki kesimpulan dan kesimpulan yang bermasalah harus kita selesaikan bukan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Ini dari kita dan untuk kita. PMK ini sesuatu yang sifatnya ini virus dan mendadak. PMK ini tidak bedanya dengan Virus Corona, tidak apa tidak bedanya dengan virus-virus yang lain, ini dia mendadak. Untuk itu apapun juga harus segera terselesaikan agar tidak menjalar di daerah lain.

Tadi Pak Ketua katakan bahwa berapa pun kita akan bersama-sama minimal kita akan dukung. Dan saya kira Pak Ketua dukungan itu sangat cukup penting, yang penting sekali adalah kementerian menyelesaikan konsep untuk menyelesaikan ya PMK ini agar dia bisa masyarakat bisa terhindar, masyarakat tidak waswas, tidak bingung sehingga peternak yang kita harapkan yang kemarin-kemarin kita bicara soal daging kebutuhan daging sekarang kita lagi tidak bicara kebutuhan daging, kita bicara soal PMK. Untuk itu, di dalam forum yang berbahagia ini sebagai Anggota DPR RI ya kebetulan saya ini dari Fraksi Partai Nasdem tapi saya juga memiliki ya memiliki wilayah yang saya juga harus mewakili.

Untuk itu, terus terang saja daerah-daerah kita di sana juga sangat membutuhkan ya sangat membutuhkan terkait dengan ya kita mau Alsintan kita juga sudah bicara soal Alsintan. Kita mau bicara soal cabai juga kita sudah bicara soal cabai tapi bagaimana kita menyelesaikan bukan cabai saja jagung juga. Kalau cabai sudah selesai besok-besok akan muncul lagi cuma kan cuaca ini kan kita tidak bisa menyelesaikan semua. Untuk itu, kalau ada kendala seperti ini mari kita menyelesaikan dengan baik. Ya harapan kita kesimpulan-kesimpulan pada Raker pada RDP ya kita akan menindaklanjuti dan yang belum selesai itu maka kita menyelesaikan untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan negara.

Saya kira demikian.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Wa'alaikumsalam

Terima kasih ya.

Ini sudah habis semuanya hampir semuanya sudah selesai tinggal satu lagi pasti ini Pak Edward Tannur Fraksi Kebangkitan Bangsa juru bicara dari sebelah barat. Silakan.

F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):

Baik.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ya, santai ini lagi santai ini. Suasana kebatinan lagi damai ini sekarang, cuma PMK ya kita santai-santai saja tapi serius. Jadi ini lagi topik hangat.

Pimpinan beserta seluruh Anggota Komisi IV yang saya hormati, Pak Menteri, Dirut beserta jajarannya, Dirut Bulog, Pupuk Indonesia dan ID Food yang sama juga saya hormati,

Memang cukup hangat dan sangat, sangat menyita banyak perhatian tentang PMK, tapi tadi teman-teman sudah banyak menyampaikan saya tidak usah tambah lagi nanti tambah ruwet lagi. Jadi saya mengiyakan saja karena itu pemikiran yang brilian sudah itu sudah bagus sudah. Saya bahas mengenai produksi pangan karena ya kalau kita sudah semua fokus di PMK siapa lagi yang nanti berbicara tentang pangan. Jadi keadaan dunia saat ini terjadi krisis pangan. Jadi jangan sampai kita sudah krisis baru kita bicara pangan. Sekarang kita bahas memang mengenai pangan karena pasti cepat atau lambat krisis itu sudah datang di depan tinggal mau kita alami saja. Banyak negara-negara penghasil pangan terkemuka sudah menyetop ekspor pangannya keluar karena mereka lebih jeli mengetahui bahwa keadaan ini akan berlanjut karena terjadi anomali iklim. Jadi tidak ada kepastian mengenai produksi pangan. Kita boleh merasa yakin tapi yakin itu harus diikuti dengan kenyataan. Kalau hanya teori, ah bisa saja orang berteori produksi pangan jangankan 50 padi 54 juta ton, 100 juta ton juga bisa tapi dilihat dari kesiapan kita di lapangan dan kelengkapan alat-alat pertanian, pupuk, dan lain-lain sebagainya faktor-faktor yang turut mempengaruhi produksi pangan.

Kalau kita mau lihat sekarang bahwa ya di media kita dengar bahwa Indonesia punya rencana mau ekspor beras ke China. Saya dalam hati, saya pikir Cina itu tidak kurang beras, dia punya satu hektar saja bisa produksi padi itu 12 ton. Kita hanya 5 ton saja sombong juga kita ini. Jangan kita amankan dulu kita punya kebutuhan nasional. Ini bukan pesimis, kita boleh optimis boleh tapi dalam mimpi dulu karena kenyataannya belum. Jadi tolonglah Pak Menteri koordinasi dengan Bulog yang stabilisasi pangan ini tolonglah dikoordinasi baik-baik sehingga kita tidak menciptakan permasalahan baru yang timbul di dalam masyarakat.

Mengenai stabilisasi harga pasca panen seperti kita lihat yang tadi harga beras masih di atas Rp10.000,- tapi harga gabahnya di bawah Rp4.000,- ini yang perlu kita tindak lanjuti kita antisipasi kan tujuan semua mau jual beras

mau ekspor beras tujuannya untuk kesejahteraan rakyat. Kalau rakyat tidak sejahtera untuk apa kita jual-jual keluar, hanya masalah gengsi saja kan percuma. Tujuan kita bernegara itu bagaimana menyejahterakan rakyat dan seluruh tumpah darah Indonesia ini. Jadi kebijakan itu jangan bersifat insidental harus bersifat menyeluruh dan berkesinambungan. Ini yang perlu saya tekankan.

Mengenai program-program saya lihat sudah oke berjalan, hanya kadang cepat kadang lambat. Ya sama saja kita bawa mobil kadang jalannya becek atau mendaki ya pelanlah, kalau rata tol ya 120, 150, tapi kalau jalan lagi berbecek ya kita hati-hati waspada jangan sampai kita tergelincir. Jadi mengenai dana untuk PMK ini saya kira pemerintah pasti akan memberikan apresiasi dan memberikan bantuan karena ditunda pun lebih fatal, lebih baik sebelum dia menjalar menjadi wabah yang luar biasa, kita tangani sejak sekarang. Tidak ada guna kita buat program terlalu banyak tapi bahaya ada di depan. Kita tidak atasi bahaya ini malah kita melihat yang akan datang, padahal ini sudah, kita sudah memasuki bahaya yang sekarang ini.

Jadi, usul saya ya tolonglah pemerintah mengantisipasi mengenai wabah PMK ini secara serius dan kerja sama yang kompaklah jangan sampai kita saling menyalahkan saja percuma. Kita sekarang ini kesulitan duit, duitnya tidak ada anggarannya. Coba anggarannya dikasih, beli saja vaksin banyak-banyak divaksin saja, duit sekarang. Jadi bagaimana kita mengupayakan kerja sama antara Komisi IV dan Kementerian Pertanian dan *Stakeholder* yang terlibat di dalamnya untuk membicarakan ini. Jadi kita lakukan antisipasi awal sebelum wabah ini meledak. Sekarang kan NTT kan masih bebas. Ya, jangan sampai kalau besok NTT juga sudah kena, kita mau ke mana lagi makan daging sapi dari mana lagi, ya makan ayam saja sudah.

Jadi yang belum kena wabah ini harus proteksi secara baik vaksin dulukan ke sana yang daerah-daerah yang belum terjangkau PMK, vaksin duluan ke sana. Kalau sekarang kita masih ragu-ragu tentang pengadaan vaksin karena ketersediaan dana kurang ya mau salah siapa ini, salah yang pegang uang itu kenapa tidak kasih uangnya turun. Apanya yang susah dipikir terlalu susah apanya? Kan gampang saja dana ada, beli, yang penting rakyat bisa terbebas dari harta miliknya ini harta milik rakyat ini sama juga milik negara. Jangan sampai sapi-sapi sudah mati semua, kita impor lagi bibit sapi dari luar lagi tambah kena PMK lagi. Celaka sudah kita. Suatu saat Indonesia ya semoga tidak, mau makan daging sapi itu sulit nanti kemudian. Ya, kalau virusnya mutasi dari sapi ke sapi, dia dari sapi ke manusia, bagaimana caranya? Kalau seandainya kita tidak mengharapkan itu secanggih-canggihnya teknologi ilmu kedokteran pasti ada lemahnya. Kalau dia mutasi ke manusia bagaimana sudah, kita tidak rapat lagi dan kita tidak masuk kantor lagi, masing-masing isolasi mandiri di rumah sudah semua.

Jadi, itu saya menyampaikan kami dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa melihat semuanya itu mari kita bersama-sama kerja sama dan sama-sama kerja mencari solusi, yang penting kita harus saling mendengar, saling memberi masukan karena di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Lupa sering lupa dan alpa. Jadi antisipasi awal ini perlu sekali kita lakukan. Saya

ingatkan lagi karena saya Dapil NTT, tolong vaksin segera kirim ke sana supaya daerah kami jangan terjangkit virus kah ini penyakit kuku dan mulut ini.

Semoga kami harapkan semoga Bapak Menteri beserta jajarannya dan semua *Stakeholder* yang berkepentingan yang bertanggung jawab termasuk kami juga Komisi IV diberi lindungan oleh Allah Yang Maha Kuasa supaya tetap tabah, kuat, kerja terus, kerja keras, pantang menyerah.

ANGGOTA:

Merdeka!

F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):

Jangan dulu, jangan merdeka dulu, kita omong lagi dulu sedikit habis baru merdeka. Belum masih berjuang ini.

Jadi Pak Menteri, terakhir saya mohon maaf karena teman-teman mau merdeka sudah, jadi saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang sekiranya terlanjur saya omong yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Tujuan kita sama satu, yaitu bagaimana NKRI bisa tetap jaya.

Merdeka!

KETUA RAPAT:

Memang, memang Pak Edward luar biasa. Bapak tadi minta vaksin Pak vitamin obat-obatan sama disinfektan saja enggak ada. Jadi jangan omong kosong lah, jangan Bapak mimpi terlalu tinggi Pak, enggak usah ya. Paling enggak besok baru datang beberapa puluh ribu sih vaksinnya? Yang lainnya kan belum disetujui anggarannya. Obat-obatan, antibiotik, disinfektan seharusnya kan pencegahan awal adalah seperti itu, ini saja enggak ada ya kan ya Pak.

F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):

Pak Ketua saya tambah sedikit. Masalah duit ini enggak ada ini kita mau ambil di mana duitnya Menteri?

KETUA RAPAT:

Duit itu bisa kita bantu bicara tapi harus jelas dulu tujuannya ke mana dan untuk apa ya kan. Nanti jangan sampai kita semua Komisi IV disalahkan ya.

Oke. Silakan Pak Dedi.

F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):

Baik.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Baik, Pak Edward ya.

Kalau untuk urusan rakyat yang menyangkut masa depannya jangan pernah ragu untuk mengeluarkan duit karena ini menyangkut kehidupan, karena kalau ini tidak beres maka sekian puluh tahun ke depan kita akan mengalami problem yang secara terus-menerus tidak pernah berakhir. Duit bisa dicari tapi nyawa tak ada gantinya, ini yang penting. Terima kasih Pak Edward. Jangan pesimislah kita sepakat untuk ini digeser tinggal mekanismenya misalnya kalau mekanismenya harus ada alokasi untuk penggantian sapi yang mati, berarti harus ada kejadian luar biasa yang sebagai peristiwa bencana yang dialami dunia peternakan kita. Nah, ini rumusan teknisnya harus seperti apa. Nanti kalau peternak peternakannya harus diganti, judulnya harus apa agar tidak menyalahi aspek-aspek sistem pengelolaan keuangan kita.

Nah, ini yang menjadi problemnya saya tawarkan begini deh sekarang kan fokusnya ada 3, yang pertama adalah menyusun alokasi keuangan untuk penanganan PMK. Ini kan ini penting ini yang pertama. Yang kedua, disepakati atau tidak sepakati untuk urusan masih perlukah kita ekspor beras, ini penting. Yang ketiga, bagaimana penanganan cabai. Tiga fokus ini yang harus kita bereskan bersama jadi kita *rule*-nya ke situ agar rapat ini menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kebutuhan publik hari ini, ini fokus kita.

Nah untuk itu agar fokus, Pak Menteri silakan jawab dulu 5 menit atau 10 menit setelah itu kita *break*. Setelah kita *break* kemudian kita nanti pendalaman, mendalaminya jangan terlalu dalam karena kalau air sudah keluar didalami terus nanti malah jadi keruh. Kita ingin mengambil manfaat bagi sebuah peristiwa, kita ingin mengambil manfaat bagi sebuah Rapat Kerja bukan persoalan panjangnya ngomong.

INTERUPSI F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi Ketua.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Silakan.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Kiki.

Pak Budi, ada Pak Budi kan di situ? Oh ya oke mastiin dulu itu kursi, oh ada Bu Anggi ya.

Pimpinan, saya rasa semakin lama kita duduk di sini, kapan mereka kerja lagi ini mengurus PMK ini begitu loh. Kita rapat berjam-jam sehari-hari

anak buahnya di depan semua, akhirnya enggak ada yang jalan ini kerjaan. Jadi mohon dengan tidak mengurangi rasa hormat, kalau *break* silakan nanti mau dilanjut tapi saya rasa apakah perlu atau tidak untuk pembahasan panjang lebar untuk dipikirkan kembali oleh Pimpinan dan rekan-rekan sekalian.

Saya tadi sebelum masuk Pak Dedi baca *YouTube* komentar apa sih begitu loh. Kita kayak begini juga maaf ngomong, masyarakat juga enek, ini saya ngomong apa adanya mohon maaf Pak, saya orang kampung jadi enggak bisa ngomong baik-baik atau apa ceplas-ceplos lah ya mungkin. Nah, jadi maksud saya *impact* kita hari ini berbicara membuat kesimpulan supaya segera dieksekusi oleh Kementerian. Jadi Ibu Anggi, Pak Budi, Pak Budi ya ya Pak Budi jangan cuekin saya terus dong. Jadi Pak Dedi, jadi supaya ini pada saat setelah *break* kalau bisa masuklah kesimpulan rapat supaya mereka bisa kerja. Saya mohon dengan segala rasa hormat karena virus tidak menunggu kita sampai selesai rapat.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Baik.

Sarannya sangat baik, *break* kita manfaatkan nanti shalat dan ngumpul lah apa sih poin-poinnya kita sepakati bersama ini para Kapoksinya ada. Kemudian ketika masuk kita sudah ada kesimpulan yang jelas enggak lagi ada debat anggarannya berapa mengambil dari mana sudah *clear* setuju tidak? Karena ini enggak bisa ditunda-tunda lagi. Kita gini-gini digaji tiap hari, orang hilang satu sapi enggak ada gantinya ini ini penting.

Untuk itu, hari ini Bapak jawab deh dulu agar aspek formalnya terpenuhi Bapak 5 menit dulu deh ya.

Terima kasih.

MENTERI PERTANIAN RI (Prof. Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH., M.Si., MH.):

Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV, Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati,

Saya ingin pertama menyampaikan rasa terima kasih saya. Saya rasanya dibela di forum ini bukan tantangan atau *challenge* tapi saya merasa dibela karena apa yang terjadi sebenarnya PMK itu masalah bersama. Kita semua tidak menginginkan tetapi kondisinya seperti itu. Oleh karena itu, saya menyampaikan terima kasih. Saya akan kerja keras Bapak. Kami tidak pernah istirahat ini. Gugus tugas sudah ada, *Crisis Center* sudah ada, secara berjenjang jalan. Rapat di Kabupaten setiap hari, rapat Provinsi dua kali sehari, rapat di kami tiga kali sehari. Oleh karena itu, data pun seperti itu dan kalau mau lihat data ya seperti itu Bapak. Nah, kurang lebih seperti itu yang saya.

Kami jalan *loh* Pak, cuma karena ada pertimbangan-pertimbangan lain kalau ini menjadi katakan lagi krisis apa *Country Based* maka seluruh kita kena. Banyak daerah yang masih hijau, NTT semua hijau, Pak. Hijau itu berarti tidak ada PMK, itu makanya. Yang meningkat ini di Jawa terutama karena ya kurang lebih seperti itu. Saya tidak mau panjang-panjang saya merasa terbelas. Kita perlu vaksin, vaksin darurat saya cari satu hari Pak, 23 jam baru kita dapat dan itu seperti itu.

Yang kedua, saya kira masalah ekspor.. begini Pak, surat datang dari Cina untuk kita minta beras, kita belum setuju itu belum Bapak. Ini harus dibawa dalam Rapat Internal di Presiden harus dipertanggungjawabkan di mana mengambilnya daerah mana. Sarawak minta kemarin Bapak. Jadi begitu, jadi ini cuma menggambarkan bahwa mereka tahu kita punya stok. Kita belum berbicara dengan Bulog ya Bapak, kita mesti rapatkan juga. Nah, itu Bapak sekalian dan terakhir sekali saya kira *Food Estate* itu kalau kita lihat data Kementan ya sedikit Bapak ya. Jadi, PUPR itu besar, Menhan itu 500 miliar itu enggak pernah turun. Jadi kalau kita dibilang, tapi saya percaya bahwa dalam rangka mempersiapkan infrastruktur di sana Pak, tidak semudah yang kita lihat itu Kalimantan Tengah itu kan rawa-rawa Bapak disulap begitu enggak gampang dan itu masa depan. Jadi jangan cuma lihat hasilnya yang sekarang tapi ini.

Saya akan menyesuaikan, saya punya Dirjen silakan koreksi saja *Insyah Allah* tidak ada proyek-proyek di dalam PMK. Masa' sudah seperti ini kita enggak. Saya siap kerja Bapak bahwa kita tidak eksplosif seperti itu tentu saja karena kita tidak mau kepanikan menjadi, kurang lebih tidak sampai 200.000 dibandingkan 16 juta, saya kira ini harus menjadi bagian-bagian yang kita harus perhatikan.

Terima kasih, saya siap menyesuaikan, saya siap koreksi dan siap memberi jawaban secara tertulis.

Sekian.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Baik.

Terima kasih, Pak.

Kita cepat saja tiga fokus kesimpulan ini harus menjadi kesimpulan pada masa *break* ini, *sholat* 5 menit, makan 10 menit, saya pikir 15 menit kita kumpul di ruangan atas Pak, selesai dan setelah itu masuk ke sini sudah ada kesimpulan dan yang paling utama adalah sudah teralokasikan pembiayaan untuk penanganan PMK karena rapat-rapat dilaksanakan tiap hari kalau tidak ada perangkat untuk menyelesaikan rapatnya tidak ada arti.

Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Dengan ini saya nyatakan waktunya diskors sampai Pukul 13.30 WIB

(RAPAT DISKORS PUKUL 13.30 WIB)

(SKORS DICABUT PUKUL 13.36 WIB)

Terima kasih.

Shalat *Dzuhur* dan makan siang. Dari sisi mekanisme tata tertib rapat, setelah jawaban dari pemerintah ada pendalaman bagi para Anggota DPR Komisi IV. Apakah mekanisme pendalaman akan digunakan atau tidak?

Tidak. Jadi dilanjutkan ke kesimpulan. Baik.

(RAPAT: SETUJU)

Silakan kesimpulannya dibacakan.

Terima kasih.

Untuk kesimpulan nanti dibacakan oleh rekan saya dari Sulawesi Selatan, biar logatnya sama dengan Pak Menteri. Terima kasih.

Pak Sekjen, diskors dulu ya 5 menit untuk rumusin aspek administratif yang harus muncul. Silakan Pak, Pak Sekjen dengan.

Kesimpulan, Pak Wakil Ketua, silakan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (RUSDI MASSE MAPPASESSU):

Terima kasih, Ketua.

Pimpinan Anggota yang saya hormati,
Kementerian, Pak Menteri bersama jajaran mitra saya hormati,

Baik, saya akan bacakan kesimpulan.

1. Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Indikatif Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023 berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S.353/MK.02/2022 dan B.301/M.PPN/D.8/PP.02/04/04/2022 tanggal 18 April 2022 sebesar Rp13.725.351.356.000,-.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Anggota?

ANGGOTA:

Setuju.

(RAPAT: SETUJU)

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (RUSDI MASSE MAPPASESSU):

2. Komisi IV DPR RI menyetujui usulan realokasi anggaran Kementerian Pertanian tahun 2022 sebesar Rp180.779.500.000,- dalam rangka penanganan wabah penyakit mulut dan kuku pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan rincian:
 - a. Relokasi Internal Direktorat Jenderal Peternakan sebesar Rp80.779.500.000,-;
 - b. Relokasi Eksternal sebesar Rp100.000.000.000,-
Sehingga rincian anggaran per Eselon I tahun 2022, sebagai berikut:
 - a. Sekjen sebesar Rp1.580.813.463.000,-;
 - b. Irjen sebesar Rp97.677.527.000,-;
 - c. Dirjen Tanaman Pangan sebesar Rp2.173.179.655.000,-;
 - d. Dirjen Hortikultura sebesar Rp1.089.990.027.000,-;
 - e. Dirjen Perkebunan sebesar Rp1.159.410.034.000,-;
 - f. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp1.690.667.032.000,-;
 - g. Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp2.955.669.852.000,-;
 - h. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebesar Rp1.294.561.050.000,-;
 - i. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian sebesar Rp1.233.061.773.000,-;
 - j. Badan Ketahanan Pangan sebesar Rp321.521.136.000,-; dan
 - k. Badan Karantina Pertanian sebesar Rp1.072.159.703.000,-

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Anggota?
Pemerintah?
Setuju.

(RAPAT:SETUJU)

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (RUSDI MASSE MAPPASESSU):

3. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan dan mendukung terkait kebutuhan anggaran tahun 2022 untuk penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sebesar Rp4.415.730.025.000,- yang di antaranya akan digunakan untuk vaksin, obat-obatan, desinfektan, penggantian ternak yang mati akibat terdampak PMK, dan operasional pendukungnya. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Pertanian untuk mengajukan usulan kebutuhan anggaran penanganan penyakit mulut dan kuku kepada Menteri Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Anggota?

Pemerintah?

PEMERINTAH:

Izin, Pak Menteri.
Kata-kata miliar saja yang dalam kurung, kurang i.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Oh miliar hanya sekedar redaksional.
Oke setuju?

PEMERINTAH:

Setuju.

(RAPAT: SETUJU)

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Baik.

Bapak dan Ibu yang saya hormati,

Seluruh rangkaian rapat sudah bisa kita laksanakan dan kita bisa dengan tepat waktu merumuskan sesuatu yang dibutuhkan oleh publik, sehingga Kementerian Pertanian bisa terus bekerja dengan cepat menyelesaikan berbagai *problem* dan kemudian apa yang kita sampaikan sesungguhnya hanya mewakili dari aspirasi masyarakat. Kita menyampaikan kegelisahan yang terjadi dan jajaran eksekutif bisa mengeksekusi seluruh kegelisahan itu menjadi kebaikan dan kebahagiaan.

Selanjutnya silakan Pak Menteri memberikan *statement* terakhir.
Terima kasih.

MENTERI PERTANIAN RI (Prof. Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH., M.Si., MH.):

Pimpinan dan segenap Anggota DPR Komisi IV,
Pak Sekjen, segenap jajaran Kementan dan mitra Bulog dan yang lain yang sangat saya hormati,
Bapak/Ibu sekalian,

Alhamdulillah Wasyukrulillah, kami merasa sangat terbantu dengan berbagai kesimpulannya yang ada, minimal ini akan mempercepat langkah kami melakukan upaya-upaya maksimal khususnya dalam rangka penanganan PMK. Mohon senantiasa *advice* dan mungkin pendampingan dari Komisi IV untuk kita menangani secara bersama. Sekali lagi PMK ini adalah masalah bersama, tidak bisa sendiri kami untuk melakukan dan membutuhkan upaya-upaya dan langkah konkret untuk membela kepentingan peternak lebih khusus dan masyarakat pada umumnya.

Terima kasih atas Rapat Kerja yang berlangsung sangat luar biasa ini. Semoga ridho Allah bersama kita.

Sekian.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Terima kasih.

Seringkali kita jengkel pada istri kita yang bawel dalam setiap saat mengingatkan kita dari urusan makan, pakaian, tidur segala macam, dan seringkali kita menderita ketika istri kita tidak menyapa hanya 2, 3 hari membuat kita kebingungan langkah salah kita apa. Jadi, kalau Komisi IV bawel itu cermin bahwa kita menyayangi tapi kalau Komisi IV sudah enggak ngomong tandanya kita cerai hari ini.

Terima kasih. Semoga rapat ini bisa bermanfaat dengan baik. Semoga seluruh kebawelan menjadi keindahan pada waktunya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Sampurasun.*

Rapat ditutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.55 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

Drs. ACHMAD AGUS THOMY
NIP. 196508171988031002